



Pemerintah  
Kabupaten Pesisir Selatan

# LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
TAHUN 2024



Gedung PLUT



Pelatihan Roti dan kue



Pelatihan Service sepeda motor



Pelatihan Service AC



PAINAN  
2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA (LKJ)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pesisir Selatan, 26 Februari 2025

Inspektur

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.  
Pembina Tk.IV.b  
NIP. 19780528 200501 2 004

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang menjadi bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi. Dalam rangka merespon tantangan dan dinamika global seperti tantangan klasik sektor pertanian, dampak perubahan iklim, tekanan geopolitik dunia, pembatasan distribusi dan tantangan perdagangan dunia, maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kabupaten Pesisir Selatan harus cepat dan tanggap menyusun strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya sektor Koperasi dan UKM.

LKj tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan dan pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, namun juga memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga

Kerja Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari tingkat Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan tidak lupa yang terpenting peran Pengurus/Pengawas Koperasi dan Pelaku Usaha. Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan Koperasi dan UKM kedepannya serta penurunan pengangguran terbuka.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun. Terimakasih.

**Painan, 31 Januari 2025**  
**Kepala Dinas.**



**YANDES AMRIANAL, M.Pd. M.Si.**  
**NIP. 19660103 199412 1 002**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Pesisir Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

### **MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**

Rata-rata pencapaian kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 74,90%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik**. Rincian capaian indikator per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	A (85)	AA (90,78)*	106,80
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	100	43	43,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1</b>					<b>74,90</b>

### **MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**

Rata-rata pencapaian kinerja untuk 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 92,11%. Berdasarkan klasifikasi penilaian/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	35	32,57	93,06
2.	Meningkatnya daya Saing Sektor Unggulan	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	78	79,12	101,44
3.	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60	5,06	81,82
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3</b>					<b>92,11</b>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Dinas	3
1.5 Struktur Organisasi	3
1.6 Kepegawaian	4
1.7 Sarana dan Prasarana Penunjang	8
1.8 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	10
1.9 Sarana dan Prasarana Penunjang	10
1.10 Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
2.3 Indikator Kinerja Utama	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	18
3.4 Realisasi Anggaran	101
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Saran	104
LAMPIRAN :BERITA ACARA RASIONALISASI RENSTRA SERTIFIKAT PENGHARGAAN PERJANJIAN KINERJA 2024	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3	Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural 2024	6
Tabel 1.4	Tujuan, Strategi Dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terkait Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	9
Tabel 2.1	Matrik Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun 2024	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	14
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama dan target capaian tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	15
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2024	18
Tabel 3.3	Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1	20
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	21
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2024	22
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja s/d Periode Renstra Nilai AKIP Perangkat Daerah	22
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional	23
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 1 (Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja)	26
Tabel 3.9	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.10	Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2023	28
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024	30
Tabel 3.12	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Tahun 2022-2024 Sasaran 2	30
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja s/d Periode Renstra Sasaran 2	31
Tabel 3.14	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi	33
Tabel 3.15	Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah)	33

Tabel 3.16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024	35
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024	36
Tabel 3.19	Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan Rat, Volume Usaha Dan Asset Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	37
Tabel 3.20	Jumlah Koperasi Aktif Secara Keseluruhan Kabupaten di Pesisir Selatan Tahun 2024	40
Tabel 3.21	Rekapitulasi Data Koperasi	50
Tabel 3.22	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022 Persentase Koperasi Berkualitas	50
Tabel 3.23	Perbandingan Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Berdasarkan RAT, Volume dan Asset Tahun 2022 s/d 2024	51
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja s/d Periode Renstra Sasaran 3	51
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional	52
Tabel 3.26	Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021-2024	52
Tabel 3.27	Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Koperasi Berkualitas	56
Tabel 3.28	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Koperasi Berkualitas	57
Tabel 3.29	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
Tabel 3.30	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024	58
Tabel 3.31	Data Usaha Mikro Menjadi Wirausaha Tahun 2021 - 2024	59
Tabel 3.32	Rekapitulasi Data Umkm Per-Sektor Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	59
Tabel 3.33	Rekapitulasi Data UMKM Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	60
Tabel 3.34	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023 Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	62
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai dengan Periode Renstra Sasaran 3	62
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 denganStandarProvinsi dan Nasional	63
Tabel 3.37	Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 4 (Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan)	68
Tabel 3.38	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	68
Tabel 3.39	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
Tabel 3.40	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024	72
Tabel 3.41	Data Pengangguran dan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s/d 2024	74

Tabel 3.42	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka	75
Tabel 3.43	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai s/d Periode Renstra Sasaran 5	76
Tabel 3.44	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional	76
Tabel 3.45	Pelatihan Berbasis Kompetensi UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Painan Tahun 2024	79
Tabel 3.46	Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Painan Tahun 2024	80
Tabel 3.47	Data Pencari Kerja (AK1 ) Tahun 2024	96
Tabel 3.48	Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	96
Tabel 3.49	Data Bursa Kerja Khusus (BKK) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	97
Tabel 3.50	Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Menurunnya Pengangguran	99
Tabel 3.51	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka	99
Tabel 3.52	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	100
Tabel 3.53	Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pesisir Selatan	4
Gambar 1.2	Data Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar 1.3	Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024	6
Gambar 3.1	Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	24
Gambar 3.2	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	25
Gambar 3.3	Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	25
Gambar 3.4	Penerimaan piagam penghargaan terbaik I nilai AKIP Tahun 2023	26
Gambar 3.5	Pelatihan Perkoperasian Pola Syariah Bagi Pengurus Koperasi Se Kab Pessel Tanggal 20 s/d 22 Mei 2024	54
Gambar 3.6	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Perkoperasian bagi Pengurus Koperasi se Kab. Pessel Tanggal 28 s/d 30 Mei 2024	55
Gambar 3.7	Pelatihan Keterampilan Kerajinan (P3KE) Membuat bagi Pelaku Usaha UMKM se Kab. Pessel Tanggal 20 s/d 22 Agustus 2024	65
Gambar 3.8	Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan (P3KE) "Pelatihan Rendang Ikan dan Lokan bagi Pelaku UMKM se Kab. Pessel Tanggal 18 s/d 20 September 2024	66
Gambar 3.9	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 2024	67
Gambar 3.10	Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM	72
Gambar 3.11	Pemanfaatan Gedung PLUT-KUMKM	72
Gambar 3.12	Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 Januari s/d 12 Februari 2024	80
Gambar 3.13	Pelatihan Fillet Welder SMAW 2F/PB yang dilaksanakan di Koto Berapak, Kec. Bayang pada tanggal 06 Februari s/d 04 Maret 2024	81
Gambar 3.14	Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (MTU) yang dilaksanakan di Nagari Tambang, Kec. IV Jurai, pada tanggal 05 Februari s/d 02 Maret 2024	82
Gambar 3.15	Pelatihan Asisten Pembuat Pakaian yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 Januari s/d 26 Februari 2024	83
Gambar 3.16	Pelatihan Tata Rias Pengantin Modifikasi Padang Pesisir Tahun 2024 di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 Januari s/d 26 Februari 2024	84
Gambar 3.17	Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 07 Mei s/d 22 Juni 2024	85
Gambar 3.18	Pelatihan Teknsi AC Residential yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 07 Mei s/d 25 Juni 2024	86
Gambar 3.19	Pelatihan Fillet Welder SMAW 3F yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 07 Mei s/d 12 Juni 2024	87
Gambar 3.20	Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik bangunan Sederhana yang	88

	dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 05 Juni s/d 23 Juli 2024	
Gambar 3.21	Pelatihan Teknisi Perawatan AC Residential yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 11 Juli s/d 12 Agustus 2024	89
Gambar 3.22	Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 11 Juli s/d 22 Agustus 2024	90
Gambar 3.23	Pelatihan Fillet Welder SMAW 3F/PF yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 11 Juli s/d 12 Agustus 2024	91
Gambar 3.24	Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 September s/d 06 November 2024	92
Gambar 3.25	Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 September s/d 17 Oktober 2024	93
Gambar 3.26	Pelatihan Tata Boga yang dilaksanakan di Hotel Saga Murni, pada tanggal 06 Maret s/d 08 Maret 2024	94
Gambar 3.27	Pelatihan Tata Rias Pengantin yang dilaksanakan di Hotel Hannah Syari'ah, pada tanggal 29 Februari s/d 02 Maret 2024	95

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

#### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2023. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut :



1. Aspek Akuntabilitas Kinerja : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

### 1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

#### 1.4 GAMBARAN UMUM DINAS

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan daerah dalam sektor Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana teknis pemerintah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah.

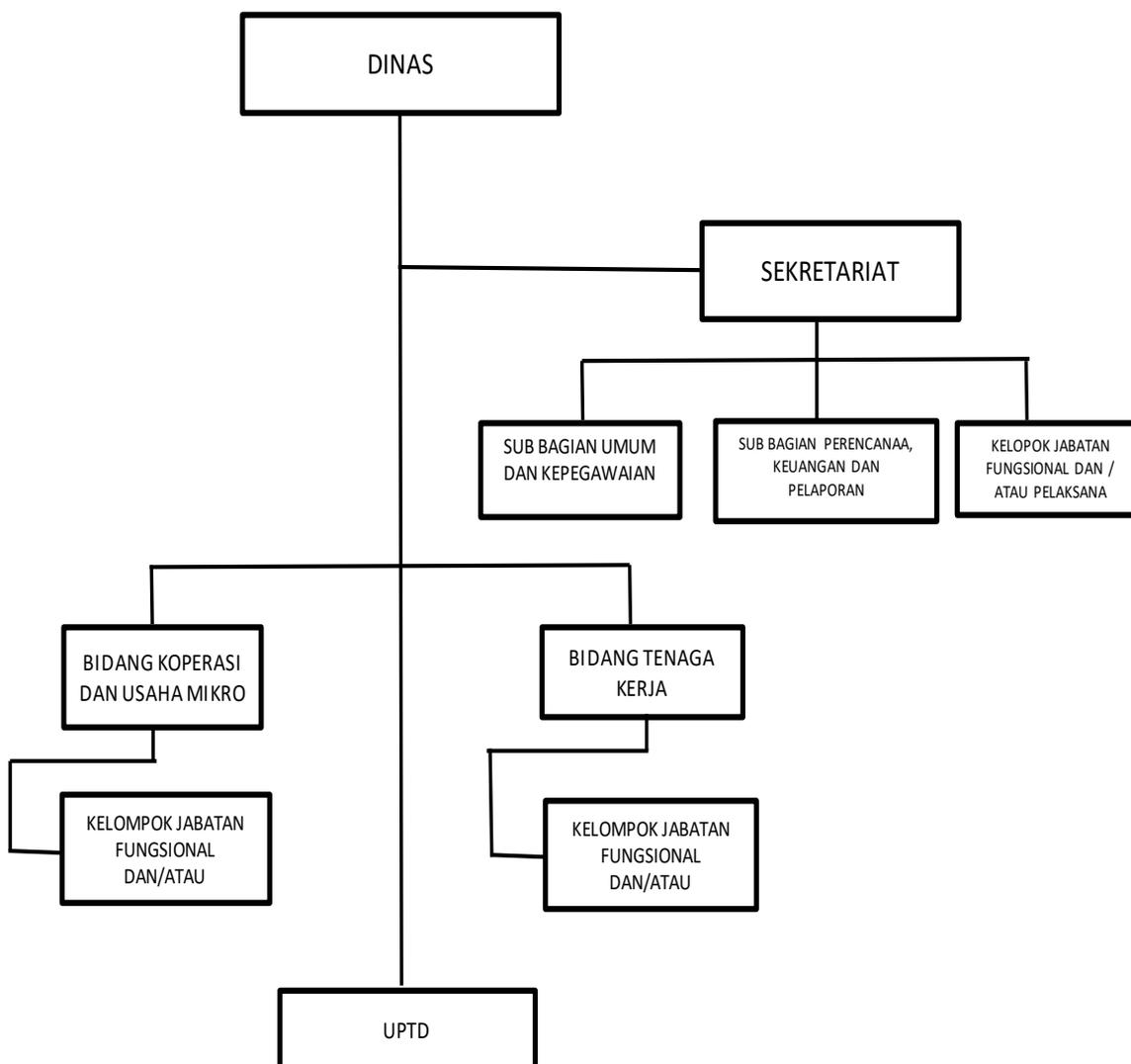
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- c. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



## 1.6 KEPEGAWAIAN

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:



**Tabel 1.1**

**Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berdasarkan Golongan**

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
3	24	2	-	29

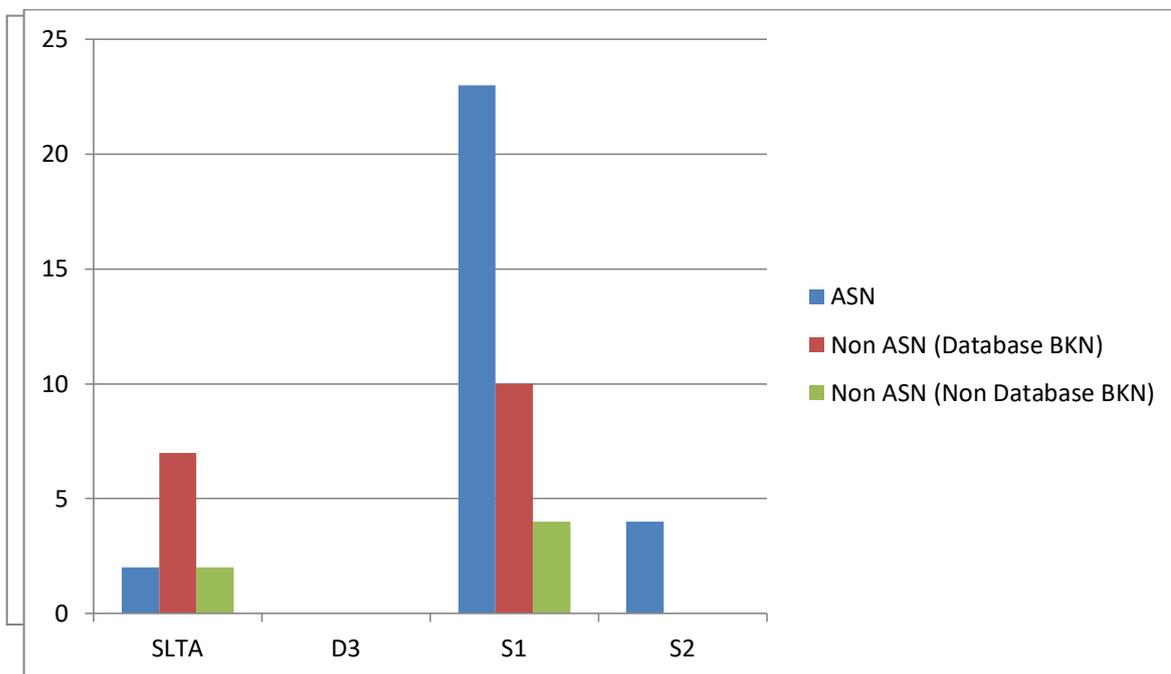
Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian Diskopnaker 2024

**Tabel 1.2**

**Data Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Uraian	S2	S1	D3	SLTA	JUMLAH
ASN	4	23	0	2	29
Non ASN (Database BKN)		10		7	17
Non ASN (Non Database BKN)		4		2	6

Sumber data : Bagian Kepegawaian Diskopnaker 2024

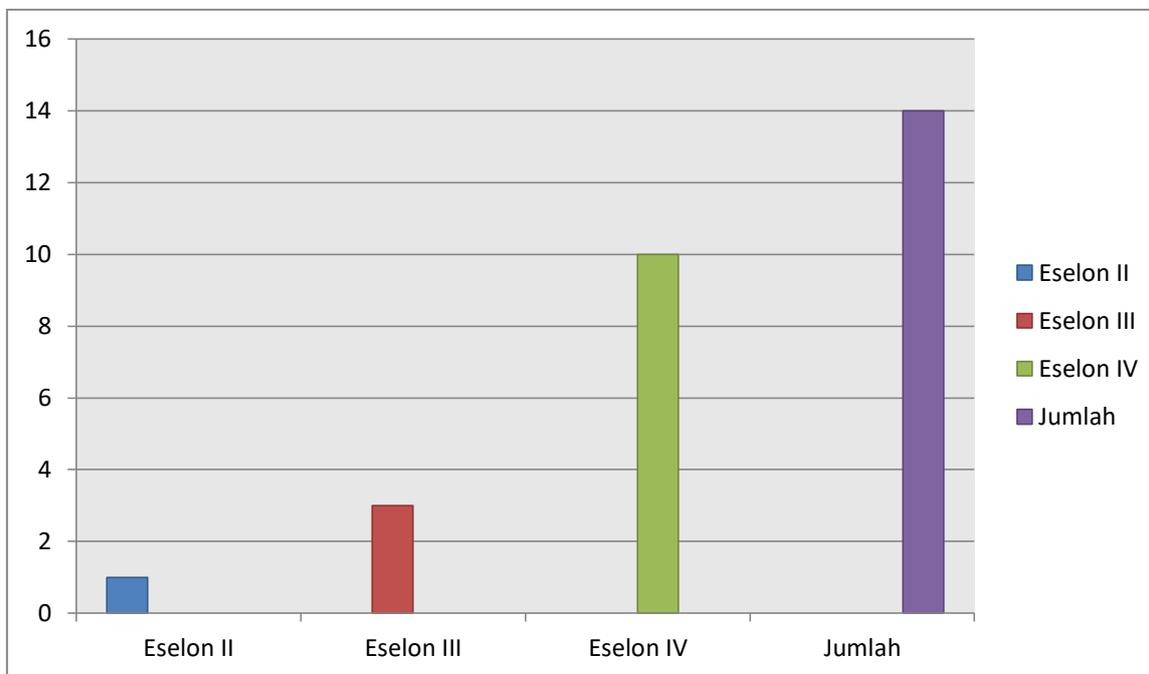


**GAMBAR 1.2**

**Data Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Tabel 1.3**  
 Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024

Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	3	10	14



**GAMBAR 1.3**

*Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024*

### Tupoksi

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 6 (enam) orang pejabat fungsional penyetaraan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 1 (satu) orang Kepala UPTD BLK dan 1 (satu) orang Kasubag Tata Usaha UPTD BLK Painan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan bidang-bidang sebagai berikut :

#### 1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

##### 1. Tugas Pokok Kepala Dinas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang menjadi



kewenangan daerah.

## 2. Fungsi Kepala Dinas :

- a. Penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- b. penentuan penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- c. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- d. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- e. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- f. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- g. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- h. pengoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
- l. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. Penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran ketatausahaan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

### 1. Tugas Pokok Sekretaris

Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. .

## 2. Fungsi Sekretaris

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### 1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan misi 1 dan 3 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

Misi tersebut memiliki dua tujuan dengan sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 1.4

**TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026  
TERKAIT DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA**

<b>VISI I : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL</b>			
<b>MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN</b>			
<b>MISI 3 : MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya sinkronisasi birokrasi yang berkinerja tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Meningkatkan kualitas layanan internal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1) Meningkatkan fasilitas layanan umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja  2) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 3) Meningkatkan kualitas dokumen pelayanan publik Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 4) Meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan asset
		2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	5) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 6) Meningkatkan realisasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Meningkatnya koperasi berkualitas	1 Meningkatkan Koperasi Sehat	1) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi 2) Meningkatkan pengawasan koperasi
	Meningkatnya daya saing sektor unggulan	2 Meningkatkan aset dan omset UMK	1) Meningkatkan kapasitas SDM UMK 2) Memfasilitasi Perizinan, sertifikat dan kemitraan bagi UMK
	Menurunnya Pengangguran	1) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	
2) Meningkatkan penempatan tenaga			1) Meningkatkan kualitas tenaga kerja



	kerja sesuai dengan dokumen Ketenagakerjaan	2) Meningkatkan layanan bursa kerja
--	---	-------------------------------------

Sumber Data : Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

### 1.8 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Dari strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat disimpulkan permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Maraknya masyarakat yang meminjam uang/modal kepada perusahaan pinjaman dana illegal, baik secara online maupun offline ketimbang meminjam ke koperasi.
2. Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui koperasi
3. Rendahnya kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja

### 1.9 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut :

#### Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

1. Tanah	559.542.842
2. Peralatan dan Mesin	10.023.486.667
3. Gedung dan Bangunan	8.416.232.028
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	585.715.974
5. Aset Tetap lainnya	1.889.999
6. Akumulasi Penyusutan	(2.481.860.597)

### 1.10 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III, Sarana dan Prasarana Penunjang, Penentuan Isu-Isu Strategis, dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
  - a. **Capaian Kinerja Pemerintah Daerah**  
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, evaluasi dan analisa capaian kinerja dimaksud.
  - b. **Realisasi Anggaran**  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV** : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah- langkah yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang secara garis besar memuat tujuan, sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Adapun Visi, misi, yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :**“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional“**.

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan kedepan.
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budipekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).



- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional” dilaksanakan melalui 6 (enam) misi. Berdasarkan 6 (enam) misi terdapat 2 (dua) misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yakni :

- Misi ke-1** : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif, Demokratis dan Transparan
- Misi ke-3** : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah

**Tabel Matrik Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

**Tabel 2.1**  
**Matrik Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun 2024**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja



2.	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi
3.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas
			Meningkatnya daya saing sektor unggulan	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha
			Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber data: Berita Acara Rasionalisasi Renstra 2021-2026

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ditetapkan dengan berpedoman pada Berita Acara Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024.

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	A (85)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	100



3.	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	35%
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	78%
4.	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6%

Perjanjian Kinerja Eselon II ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2024 dengan mempedomani Renstra 2021 - 2026. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Tim Evaluator Menpan RB, yang sebelumnya Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha merupakan indikator kinerja Eselon III, yang seharusnya menjadi Indikator Kinerja Eselon II. Sehingga perlu dilakukan Revisi Berita Acara Rasionalisasi Renstra yang ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2024 dengan merubah indikator kinerja termasuk target kinerja nilai AKIP, yang sebelumnya A (85) menjadi AA (91). Karena Berita Acara Rasionalisasi Renstra ditandatangani setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan, sehingga untuk Penetapan Perjanjian Kinerja Eselon II (Nilai AKIP) masih mempedomani Renstra 2021 - 2026 sebelum revisi.

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan, maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi Kepala Daerah yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2024**  
**Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	A (85)	Penilaian oleh Inspektorat	Sekretariat Dinas



2.	Nilai Kematangan Inovasi	100	Penilaian oleh Bapedalitbang	Sekretariat Dinas
3.	Persentase Koperasi Berkualitas	35%	Jumlah kop. yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, <u>volume dan aset</u> Jumlah Koperasi aktif	Bidang Koperasi dan UKM
4.	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	78%	Jumlah usaha mikro <u>meningkat wirausahanya</u> Jumlah usaha mikro	Bidang Koperasi dan UKM
5.	Menurunnya Pengangguran	4,6%	<u>Jumlah Pengangguran</u> <u>Jumlah Angkatan Kerja</u>	Bidang Tenaga Kerja



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKjIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

3.1.1 Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

3.2.2 Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar

dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan.sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Sumber data : LHE AKIPTahun 2023

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024**

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>Misi I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan</i>					
Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi					
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1	Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	A (85) AA (90,78)	106,80%



2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1.2	Nilai Kematangan Inovasi	100	43	43%
----	--------------------------------------	-----	--------------------------	-----	----	-----

*MISI III : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah*

Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

2.	Meningkatnya koperasi berkualitas	2.1	Persentase Koperasi Berkualitas	35%	32,57	93,06%
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	3.1	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	78%	79,00	101,28%
4.	Menurunnya Pengangguran	4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6%	5,06%	81,82%

### 3.3 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Memasuki kuartal akhir 2024, perekonomian global Indonesia masih terus menghadapi hantaman perlambatan pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan bagian dan efek lanjutan downside risks dari pandemic yang hingga kini belum usai sepenuhnya. Terlebih, sekarang Indonesia dihadapkan pada konflik geopolitik yang tengah terjadi hingga menyebabkan kenaikan harga komoditas yang mendorong terjadinya inflasi tinggi. Tingkat Inflasi sangat berdampak besar terhadap perekonomian daerah di tahun 2024. Hal ini terlihat pada capaian sektor perekonomian yang rendah pada tahun 2024.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

## Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

### 1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Untuk sasaran 1 yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dapat

diukur melalui 1 indikator seperti pada tabel 3.3 dibawah ini. Dari tabel dibawah ini diperoleh bahwa tingkat capaian pada sasaran ini cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya penyempurnaan dokumen perencanaan dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.3**  
**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Tanpa satuan	A (85)	AA (90,78)	106,80

Sumber : LHE AKIP Diskopnaker oleh Inspektorat Tahun 2023

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian kinerja mencapai angka 106,80%.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah 84,31(A) 84,63(A) 90,78(AA). Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

NO	Komposisi Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,40	27,04	27,98
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,11	23,03	26,08
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,22	12,94	14,84
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,59	21,63	21,88
	Nilai Hasil Evaluasi	100	84,31	84,63	90,78
	<i>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</i>		A	A	AA

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Inspektorat Nomor : 700.1.2.1/713/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, adalah sebagai berikut :

**1. Perencanaan Kinerja**

- a. Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria.
- b. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya.
- c. Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya.
- d. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kerja yang terbaru.

**2. Pengukuran Kinerja**

- a. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan melampirkan dokumen pendukung berupa notulen/laporan hasil pengukuran pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi setiap bulan, triwulan dan semesteran pada unit kerja (bidang).
- b. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya (bidang) sampai dengan eselon IV dan staf yang telah dilakukan setiap bulan/triwulan/semesteran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa notulen/laporan hasil pemantauan pengukuran pencapaian kinerja/realisasi



rencana aksi setiap bulan, triwulan dan semesteran pada unit kerja (bidang).

### 3. Pelaporan Kinerja

Sajikan pada LKj informasi efisiensi penggunaan sumber daya (penjabaran efisiensi sumber daya dapat diukur dari penggunaan orang, anggaran, mekanisme/SOP, waktu, dll) untuk setiap indikator capaian kinerja,

### 4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
- Memfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

## 1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Nilai AKIP Perangkat Daerah**  
**Tahun 2022 - 2024**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Skala	A (85)	A (85)	A (85)	A (84,31)	A (84,63)	AA (90,80)	99,18	99,56	106,8	99,18	99,56	106,8

Sumber : Revisi Berita Acara Rasionalisasi Renstra LHE AKIP Diskopnaker oleh Inspektorat tahun 2023

Dari tabel 3.5 diatas, jika dibandingkan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2024 jdengan 2 tahun sebelumnya, peningkatannya sangat signifikan.

## 1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja s/d Periode Renstra

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja s/d Periode Renstra**  
**Nilai AKIP Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	6
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skala	AA (91,00)	AA (90,78)	99,76	Akan tercapai sama atau lebih dari 100%

Sumber data : Revisi Berita Acara Rasionalisasi Renstra 2021-2026  
LHE AKIP tahun 2023

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 dibanding dengan target akhir renstra tahun 2026 sudah mendekati pencapaian target. Meskipun demikian, kami akan tetap berupaya agar nilai AKIP meningkat setiap tahunnya.

#### 1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat dari tabel 3.6 dibawah ini :

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional**

Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pesisir Selatan	Prov. Sumatera Barat		Nasional	
			Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemenkop dan UKM RI	Kemenaker RI
1	2	3	4	5	6	7
Nilai AKIP Perangkat Daerah	tanpa satuan	AA (90,78)	B (60,14)	BB (78,49)	B (68,78)	B

Sumber Data : LKj Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Barat Tahun 2024  
LKj Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat Tahun 2024  
<http://1data.menpan.go.id>

#### 1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Aternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 didorong oleh :

- Peningkatan kompetensi Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Peningkatan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setdakab Pesisir Selatan dan Bapedalitbang

- c. Peningkatan manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan
- d. Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- e. Adanya evaluasi kinerja secara berkala
- f. Adanya kerjasama tim dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah

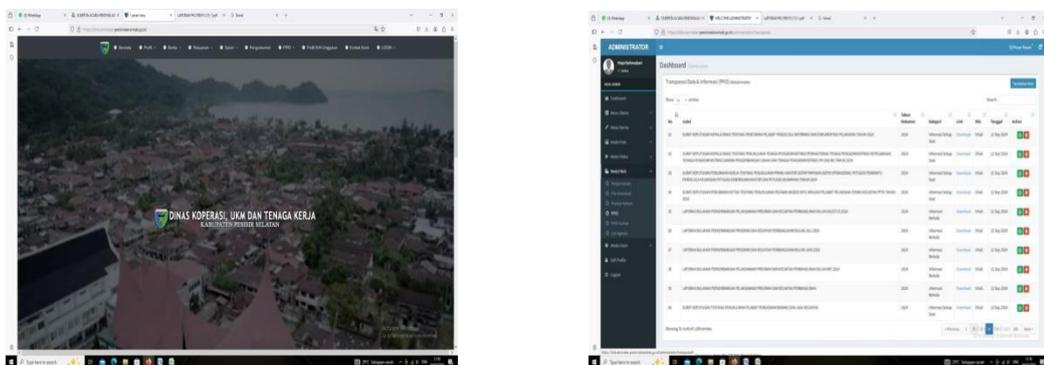
Faktor kelemahan dari Sasaran Strategis 1 antara lain :

- a. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.
- b. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang sudah ditargetkan.
- c. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome.

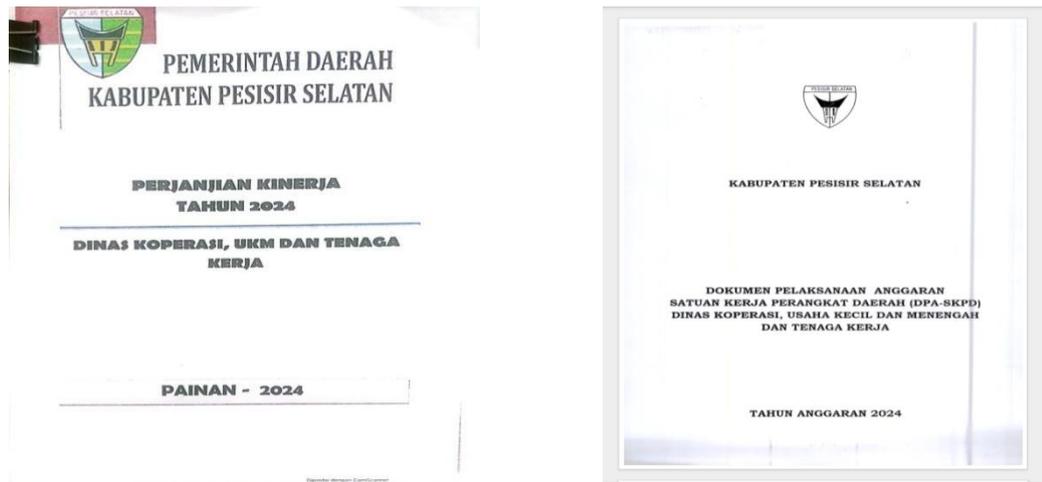
Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Keselarasan dokumen perencanaan dengan penganggaran.
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui Bimtek dan diklat.
3. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Peningkatan disiplin ASN dan Non ASN melalui arahan yang disampaikan pada saat apel pagi dan sore serta rapat-rapat staf.
5. Adanya reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi dan melanggar aturan melalui pemotongan TPP dan surat teguran.

Dalam rangka peningkatan Nilai AKIP, semua dokumen perencanaan kinerja sudah disusun dan diupload pada website Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1: Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Disamping itu sebagai tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2023, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja juga melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja atas rencana aksi, capaian target serta jika terjadi deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya. Rapat tersebut diadakan setiap bulan secara berjenjang, mulai dari rapat evaluasi kinerja tingkat OPD sampai dengan rapat evaluasi kinerja bidang.



Gambar 3.3 : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2024, berkat kerjasama tim Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja memperoleh penghargaan dengan kategori TERBAIK I Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



Gambar 3.4 : Penerimaan piagam penghargaan terbaik I nilai AKIP Tahun 2023

### 1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

**Tabel 3.8**  
**Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 1**  
**(Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja)**

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	20	20
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan TPP	%	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan internal dinas	%	100	100
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	%	100	100
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan umum yang terselenggara dengan baik	%	100	100
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100

Untuk mendukung capaian kinerja Sasaran 1 dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah ditunjang oleh 1 program dan 6 kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 90,64% dan output kegiatan sudah terlaksana 100%, berarti terdapat efisien sebesar 9,36%.

### 1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9

#### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diskopnaker	A (85)	AA (90,78)*	106,80	4.745.917.615,-	4.301.841.855,-	90,64%	15,00

Sumber : Data Capaian Kinerja Tahun 2024

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 15,00%. Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah A(85), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023 sebesar AA (90,78) dan capaian kinerja sebesar 106,80%

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,98
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,08
3	Pelaporan Kinerja	15,00	14,84
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,88
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.			90,77
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			AA

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya.

Gambar 3.5 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini



Tabel 3.10

MATRIK TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2023

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES	KOORDINATOR	EVIDEN
<b>I Perencanaan Kinerja</b>								
1	Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria :	1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap capaian target dalam rencana aksi secara periodik	Rencana Aksi dan Capaian Kinerja Secara Periodik Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Setiap bulan	Kepala Dinas	Dalam proses pelaksanaan	Sekretaris Dinas	LHE.R.1.1 Rencana Aksi dan Capaian Kinerja setiap bulan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	a. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya.							
	b. Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera lakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya.							
	c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kerja yang terbaru.	2. Melaporkan hasil kegiatan masing-masing penanggungjawab program dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja Kepala Dinas baik langsung maupun melalui WA Grup dan google drive.	Google Drive dan WA Grup	Mei 2023	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KfUwWf1PQ8tW1FSEP2x1Wcoss7Juspdrive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KfUwWf1PQ8tW1FSEP2x1Wcoss7Juspdrive_link</a>
<b>II Pengukuran Kinerja</b>								
2	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan melampirkan dokumen pendukung berupa notulen/laporan hasil pengukuran kinerja/realisasi rencana aksi setiap bulan, triwulan dan semesteran pada unit kerja (bidang).	1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Bidang dan Staf	Capaian Kinerja Bidang	Setiap bulan	Kepala Dinas	Dalam proses pelaksanaan	Kepala Bidang	LHE.R.1.2 dan R.1.3 Capaian Kinerja Bidang, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi
3	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya (bidang) sampai dengan eselon IV dan staf yang telah dilakukan setiap bulan/triwulan/semesteran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa notulen/laporan hasil pemantauan pengukuran pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi setiap bulan, triwulan dan semesteran pada unit kerja (bidang)			Setiap bulan	Kepala Dinas	Dalam proses pelaksanaan	Kepala Bidang	
<b>III Pelaporan Kinerja</b>								
4	Sajikan pada LKJ informasi efisiensi penggunaan sumber daya (penjabaran efisiensi dapat diukur dari penggunaan orang, anggaran, mekanisme/SOP, waktu, dll) untuk setiap indikator capaian kinerja	1. Menyajikan pada LKJ tentang informasi efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap indikator capaian kinerja	Laporan Kinerja Tahun 2024	Februari 2025	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE.R.1.4. efisiensi penggunaan sumber daya setiap indikator
<b>IV Akuntabilitas Kinerja Internal</b>								
a	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Membuat dokumen matrik tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP	1 dokumen	Mei 2024	Seluruh bidang	Selesai	Sekretaris Dinas	Matrik Tindak Lanjut LHE
b	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efesiansi kinerja	Rapat evaluasi setiap bulan dengan mempedomani kinerja tahun sebelumnya	perbulan	Januari s/d Desember 2024	Seluruh Bidang	Telah dilaksanakan	Sekretaris Dinas	Dokumentasi



Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan OPD Tipe C, dimana antara Bagian Perencanaan dengan Bagian Keuangan dan Pelaporan digabung menjadi 1 (satu) yaitu Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang dibantu hanya oleh 1 (satu) orang Tenaga Non ASN. Disamping itu Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan juga menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Dengan keterbatasan personil, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja mampu menorehkan prestasi tahun 2023 yaitu Nilai AKIP tertinggi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai AA (90,78).

Berikut Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang perlu dipersiapkan setiap bulan, triwulan, tahunan dan 5 tahunan, yaitu :

1. Renstra (sekali 5 tahun)
2. Proses Bisnis (5 tahun)
3. Laporan Kinerja (LKj)
4. LKPj dan LPPD
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
6. Perjanjian Kinerja
7. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
8. Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan (2 dokumen)
9. Rencana Aksi (triwulan)
10. Capaian Kinerja (triwulan)
11. Laporan Evaluasi Renja (triwulan)
12. Laporan Keuangan dan Fisik (per bulan)
13. RKA, RKA Pergeseran dan RKA Perubahan (3 dokumen)
14. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
15. Penilaian Mandiri SPIP
16. Analisis Gender (PUG/GAP)
17. Verifikasi SPJ (hampir setiap hari)
18. Verifikasi SPM/SPP ( $\pm$  4 s/d 6 kali per bulan)
19. SK Indikator Kinerja Utama
20. DII sesuai arahan pimpinan

Dari gambaran tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan diatas, dengan dibantu hanya oleh 1 (satu) orang Tenaga Non ASN dan dengan memanfaatkan waktu seefisien mungkin bahkan lembur pada hari libur, Alhamdulillah semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan kata lain, efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari segi penggunaan orang, anggaran, mekanisme/SOP maupun waktu sangat

efisien sekali

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

### 2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas inovasi daerah dapat diukur melalui tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut diperoleh bahwa tingkat capaian pada indikator nilai kematangan inovasi cukup rendah yaitu 43%.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi	100	43	43

Sumber : Bapedalitbang tahun 2024

Hasil Innovative Government Award (IGA) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-4898 tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 59,26 atau termasuk dalam Predikat "KABUPATEN INOVATIF".

Sedangkan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan Inovasi CETAK SENDIRI KARTU AK1 ONLINE (TAKSIKU ONLINE) mendapat predikat RENDAH dengan hasil validasi PERLU PERBAIKAN NILAI KEMATANGAN  $\leq 70$  (43).

### 2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Tahun 2022-2024 Sasaran 2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa Satuan	-	100	100	-	45	43	-	45%	43%

Sumber : Bapedalitbang tahun 2023 dan 2024



Untuk Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, capaian kinerja hanya sebesar 43%. Hal ini dilihat dari target 100 dan realisasi hanya 43.

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja menciptakan inovasi *Mencetak Sendiri Kartu AK1 Online* (Taksiku Online). Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Pencari Kerja dengan mencetak sendiri Kartu AK1 secara online dimana saja berada.

Latar belakang inovasi ini diciptakan karena kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan, sehingga diharapkan dapat membantu memudahkan para pencari kerja untuk memperoleh Kartu Pencari Kerja tanpa mengurus langsung ke Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Inovasi ini merupakan pengembangan dari Aplikasi SiapKerja. Namun inovasi ini belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Bidang Tenaga Kerja belum ada di aplikasi SiapKerja, disamping itu sosialisasi ke Kecamatan dan SMK juga belum terlaksana karena keterbatasan anggaran.

### **2.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada berita acara rasionalisasi renstra 2021-2026 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan**

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja s/d Periode Renstra**  
**Sasaran 2**

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	6
1	Nilai Kematangan Inovasi		100	43	43,00%	Akan tercapai sama atau lebih dari 100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada berita acara rasionalisasi renstra Dinas UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan mengalami progress dengan tingkat kemajuan 43 tahun 2024.



## **2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

## **2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Aternatif Solusi yang telah dilakukan**

Inovasi yang diciptakan pada tahun 2024 belum memperoleh hasil sesuai yang ditargetkan karena berdasarkan keterangan hasil penilaian dari Bapedalitbang, inovasi yang diajukan hanya 1 (satu), seharusnya setiap bidang mengajukan inovasi sehingga eviden yang diupload lebih banyak. Dari sekian banyak inovasi yang diajukan, pilih satu inovasi yang tingkat kematangannya paling tinggi.

Faktor kegagalan dalam pencapaian target Nilai Kematangan Inovasi sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi hanya dikerjakan oleh 1 (satu) orang staf di Bidang Tenaga Kerja tanpa didampingi.
2. Evaluasi secara berkala melalui rapat evaluasi kinerja setiap bulan, namun belum ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan pencapaian target Nilai Kematangan Inovasi, antara lain :

1. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bapedalitbang, membuat inovasi lebih dari satu dengan kata lain setiap bagian/bidang perlu mengusulkan masing-masing 1 (satu) inovasi. Dari beberapa inovasi tersebut, pilih salah satu yang lebih matang untuk diupload ke aplikasi.
2. Melanjutkan inovasi yang sudah diusulkan agar tingkat kematangannya mencapai nilai 100.
3. Membuat SK Tim Penyusunan Inovasi dengan Kepala Dinas sebagai Pengarah.
4. Melakukan evaluasi secara berkala.

## 2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**Tabel.14**  
**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja**  
**Nilai Kematangan Inovasi**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.745.917.615	4.301.841.855	90,64

Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 1 dan 2 ini sebesar Rp.4.745.917.615,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.301.841.855,- atau 90,64%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Walaupun demikian hal ini tidak mengurangi output kegiatan atau terjadi efisiensi anggaran sebesar 15%.

**Tabel 3.15**  
**Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 2**  
**(Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah)**

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja	dokumen	20	20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen keuangan yang dilaporkan	%	100	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase dokumen public yang dipublish	%	100	100	



	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia	%	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum yang terselenggara dg baik	%	100	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor	%	100	100

Untuk sasaran 1 dan 2 yaitu terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja serta meningkatnya kualitas inovasi daerah dapat dilaksanakan melalui satu program dan 6 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja kegiatan 100%.

## 2.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.16**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi	100	43	43%	4.745.917.615,-	4.301.841.855,-	90,64%	15,00

Pada sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah disimpulkan bahwa terdapat efisiensi sebesar 15%. Dengan penyerapan anggaran sebesar 90,64% dan capaian kinerja hanya sebesar 43%.

Nilai Kematangan inovasi merupakan sasaran strategis yang berada dibawah Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris serta dibantu oleh 2 orang Pejabat Eselon IV dan beberapa orang staf baik ASN maupun Non ASN.



### Sasaran 3 Meningkatnya Koperasi Berkualitas

#### 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	%	35	32,57	93,06

$$\text{Persentase Koperasi Berkualitas} = \frac{\text{Jumlah kop. Yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\% = \frac{57}{175} \times 100\% = 32,57\%$$

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas, Pemerintah mengubah paradigma reformasi pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas melalui :

1. Reorientasi

Yaitu mengubah paradigma pemberdayaan koperasi kepada kualitas bukan lagi pada kuantitas koperasi. Oleh karena itu, Pembina Koperasi serta para pemangku kepentingan, pemberdayaan koperasi mulai menggerakkan pembangunan koperasi yang berkualitas dari aspek kelembagaan, usaha dan keuangan.

2. Rehabilitasi

Yaitu pembuatan database koperasi berbasis Data Online System (ODS) diseluruh Indonesia.

3. Pengembangan

Yaitu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan SDM, kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.



**Tabel 3.18**  
**Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi (unit)	309	312	319	326	337	344
2.	Persentase koperasi aktif (%)	44,01	44,55	46	47,24	48,96	50,87
3.	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	83,82	68,34	50	46,75	36,97	43,43
4.	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja)	97,68	99,69	99,75	99,57	99,51	21.101,69

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pesisir Selatan, 2024



**Tabel 3.19**

**KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA  
BERDASARKAN RAT, VOLUME USAHA DAN ASSET  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2024**

DATA KOPERASI AKTIF YANG MENINGKAT KUALITASNYA								
No	Nama Koperasi	Tanggal Rapat Anggota Tahunan		Volume Usaha( Rp)		Asset (Rp )		Predikat
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	KPN SMP Negeri 1 Painan	06-Jan-23	12-Jan-24	1.499.027.650	1.597.556.625	2.513.705.366	2.740.563.461	Sehat
2	KPN SMK NEGERI 1 Painan	11-Jan-23	06-Jan-24	2.687.135.156	2.857.363.301	2.962.360.165	3.037.371.197	Sehat
3	KPN TARUSAN	25-Jan-23	03-Feb-24	1.273.522.140	1.277.152.181	3.148.925.293	3.154.061.230	Sehat
4	KPN RANAH PESISIR	16-Mar-23	09-Mar-24	4.771.624.015	8.094.760.845	9.354.248.789	12.106.863.656	Sehat
5	KPN TAPAN	26-Feb-23	25-Feb-24	1.821.400.000	2.649.000.000	4.952.630.951	5.177.023.343	Sehat
6	KPN MAKMUR LUMPO	18-Mar-23	07-Mar-24	963.478.229	1.387.562.371	3.104.981.247	3.255.620.991	Sehat
7	KPN SMP 2 BAYANG	18-Mar-23	23-Feb-24	1.703.802.200	2.070.724.378	2.270.755.258	2.466.997.670	Sehat
8	KPN SMP Negeri 2 Painan	19-Jan-23	27-Jun-24	446.389.898	461.700.273	915.611.047	921.870.104	Sehat
9	KSP MAJELIS TA'LIM DARUL MUTMAINAH	08-Jan-23	07-Jan-24	285.350.000	389.200.000	643.586.611	668.539.771	Sehat
10	KSU BANGKIT MANDIRI	26-Feb-23	25-Mar-24	384.851.417	402.608.672	829.758.230	922.387.853	Sehat
11	KOPERASI AL-HIKMAH	12-Jan-23	05-Jan-24	60.800.000	63.050.000	96.778.600	104.020.000	Sehat
12	KOPERASI TANI (KOPTA DARMA)	27-Jan-23	26-Jan-24	851.719.993	871.084.000	901.612.158	962.551.225	Sehat
13	KOP.JASA LKM-A DAMAR RUMPUT JAYA	20-Mar-23	09-Mar-24	251.016.000	282.591.000	408.150.414	415.628.807	Sehat
14	KPN DISPENDAKAP	20-Mar-23	24-Mar-24	6.088.908.600	6.444.030.600	6.783.166.880	7.027.945.261	Sehat
15	PRIMKOPPOL	16-Mar-23	29-Apr-24	18.439.138.853	21.130.264.221	21.561.154.424	23.672.315.737	Sehat
16	KPN JAPSI	16-Mar-23	24-Apr-24	715.348.372	762.723.372	1.043.662.703	1.091.127.940	Sehat



17	KOPERASI WANITA (KOPWAN) LAKITAN	17-Feb-23	01-Feb-24	85.472.300	94.443.900	125.819.000	128.444.900	Sehat
18	KOPERASI SERBA USAHA SAIYO MANDIRI	08-Feb-23	25-Jan-24	16.460.000	16.760.000	70.195.000	91.395.000	Sehat
19	KOP. PONDOK PESANTREN KHAIRATUL HSASANAH MUHAMMADIYAH LAKITAN	30-Mar-23	30-Mar-24	1.004.525.000	1.084.350.000	1.292.104.495	1.338.834.125	Sehat
20	KPN "KONSUMEN BAHARI" SMK N 2 PAINAN		07-Mar-24	98.100.000	168.382.000	143.236.600	183.431.793	Sehat
21	KSU LAUT BERKAH	03-Jan-24	03-Jan-24	4.000.000	4.000.000	222.673.000	263.820.000	Sehat
22	PRIMKOP KARTIKA 0311	06-Mar-23	28-Feb-24	167.087.386	643.473.776	1.835.839.999	20.078.115.106	Sehat
24	KP-RI SUTERA	22-Feb-23	07-Mar-23	14.117.623.916	14.763.685.039	16.491.143.281	17.349.319.062	Sehat
25	KPR SMA N 2 PAINAN	23-Feb-23	25-Apr-24	181.848.188	251.743.188	754.193.390	799.301.288	Sehat
26	KOPERASI "NELAYAN BERINGIN SAKTI"	15-Mar-23	08-Mar-24	37.500.000	46.650.750	378.807.400	574.407.400	Sehat
27	KPNG LINGGO ABADI	18-May-23	17-Feb-24	1.204.131.500	1.425.915.900	2.066.690.570	2.084.254.876	Sehat
28	KOPERASI PUNAGO INDAH	28-Feb-23	27-Apr-24	315.230.000	399.089.000	872.463.285	932.225.785	Sehat
29	KPN SMA 1 LENGAYANG	28-Feb-23	24-Feb-24	1.551.431.621	1.666.552.780	1.665.398.448	184.461.174	Sehat
30	KJKS BMT EL-FALAH PASAR SURANTIH	28-Mar-24	28-Mar-24	170.769.500	173.453.500	218.925.254	225.488.103	Sehat
31	KPN IV JURAI	25-Feb-23	02-Mar-24	755.694.050	955.336.450	2.620.150.251	2.840.286.317	Sehat
32	KOPERASI SERBA USAHA BANGUN BERSAMA (KSU-BB)	16-Mar-23	06-Mar-24	331.999.000	375.169.000	390.272.000	765.058.000	Sehat
33	KOPERASI AMANAH	19-May-23	07-Jun-24	109.000.000	117.465.000	117.767.000	124.669.000	Sehat
34	KOP.PRODUSEN WANITA RUMPUT LAUT (KPWRL) MUARO GADANG	07-Jun-23	12-Jun-24	86.494.000	115.105.500	162.001.000	201.635	Sehat
35	KSP KAMPUNG TARANDAM		05-Jun-24	43.521.000	61.951.000	269.330.598	274.230.703	Sehat
36	KOP. TERNAK MAKMUR BERSAMA (KTMB)	11-Mar-23	07-May-24	234.714.000	260.555.000	497.765.900	502.750.600	Sehat
37	KOPERASI TANI HARAPAN MAJU (KOPTARAMA)	03-Feb-23	03-Jun-24	40.200.000	40.500.000	59.463.931	646.002.898	Sehat
38	KOPERASI NELAYAN JAYA BERSAMA	30-Jan-23	26-Jan-24	31.902.000	40.500.000	224.684.800	235.297.000	Sehat



39	KPN DINAS PERTANIAN	23-Feb-23	28-Feb-24	2.542.050.000	3.591.050.000	6.164.606.047	6.406.165.169	Sehat
40	KPN INDERAPURA	20-Mar-23	07-Mar-24	4.188.186.926	4.527.787.069	6.685.092.560	7.098.860.444	Sehat
41	KPN RUTAN	30-Mar-23	28-Feb-24	187.066.665	326.152.786	631.985.694	646.835.685	Sehat
42	KOPERASI NELAYAN TUO SAKATO	10-Jun-23	27-Jun-24	321.090.000	328.250.000	321.090.000	3.235.150.002	Sehat
43	KOPERASI JASA USAHA BERSAMA MELATI PELAMINAN	07-Jan-23	13-Jun-24	94.450.000	98.050.000	163.709.343	171.138.862	Sehat
44	KOPERASI PEDAGANG SEPAKAT	02-Jan-23	05-Mar-24	190.600.000	206.300.000	222.383.000	235.874.000	Sehat
45	KOPERASI SERBA USAHA TAQWA (KSU.T)	27-Jun-23	31-Jul-24	905.619.138	1.037.093.259	3.502.714.233	3.806.497.789	Sehat
46	KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA) TALUK TIGO SAKATO	08-Jun-24	25-Jun-24	2.155.800.000	2.793.470.000	2.403.639.450	2.970.380.205	Sehat
47	KPN KECAMATAN LENGAYANG	11-Jun-23	10-Aug-24	15.602.057.077	15.854.023.429	17.390.362.274	18.279.190.220	Sehat
48	KSU AL USWAH	17-Mar-23	30-Mar-24	147.960.000	15.854.023	460.697.000	477.165.000	Sehat
49	KOPERASI SYARIAH BERKAH BERSAMA (KSBB)	12-Mar-23	23-Jun-24	158.535.000	215.937.500	291.609.000	295.866.500	Sehat
50	KOPERASI PEDAGANG PASAR TERNAK SAIYO	20-Jan-23	7 Mei 2024	65.400.000	97.200.000	90.160.000	120.700.000	Sehat
51	KOPERASI BONGKAR MUAT (KOPERBAM)	25-Jun-23	30-Jun-24	8.940.000	8.950.000	110.902.700	147.364.700	Sehat
52	KPN BHAKTI HUSADA DINAS KESEHATAN	25-Nov-24	25-Nov-24	5.722.351.575	6.383.281.700	16.091.868.401	16.207.278.592	Sehat
53	KOPERASI PRODUSEN WANITA RUMPUT LAUT (KPWRL)	07-Jun-23	12-Jun-24	86.494.000	115.105.500	162.001.000	201.635.000	Sehat
54	KOPERASI IWAPI DPC PESSEL	07-Jun-23	03-Sep-24	173.000.000	371.000.000	324.250.000	413.364.920	Sehat
55	KOPERASI TUNAS BARU	06-Jan-23	28-Oct-24	2.649.712.000	2.653.663.000	2.832.387.000	2.836.338.000	Sehat
56	KPRI RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	11-Dec-23	31-Oct-24	2.706.259.848	3.100.500.631	4.172.606.113	4.535.144.515	Sehat
57	KOPERASI SERBA USAHA TETESAN EMBUN	10-Apr-23	18-Oct-24	179.613.000	187.360.000	218.363.000	22.666.300	Sehat
Jumlah Koperasi Berkualitas di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024								57 Koperasi

Sumber Data : Data Keragaan Koperasi Tahun 2024 Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan



**Tabel 3.20**  
**JUMLAH KOPERASI AKTIF SECARA KESELURUHAN**  
**DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2024**

No.	Nama Koperasi	NIK/IDKOP	No. Badan Hukum	Alamat	Tanggal Pendirian	Keterangan
1	KUD Batur	1302110040027	038 b/BH/XVII	Pasar Barung Belantai	12-Jul-76	
2	KUD Batu Hampar / Duku	1302110050023	050a/BH/XVII	Duku	1-Jan-82	
3	KPN Batur	1302110040028	1501/BH/XVII	Barung Belantai	18-May-85	
4	KPN Tarusan	1302110070029	1497/BH/XVII	Nanggalo	25-Feb-85	
5	KPN SMAN Tarusan	1302110110025	1810/BH/XVII	Kapuh	27-Jan-89	
6	Koppas Tarusan	1302110070026	1950/BH/XVII	Nanggalo	23-Oct-90	
7	Kop. Sulaman Aplikasi Timbul dan Sulaman Bayangan	1302110040039	07/BH/DKUP3/VI/14	Barung-Barung Balantai	16-Jun-14	
8	Kop Nelayan Koto XI Tarusan	1302110080001	19/BH/DKUP3/III/2016	Tarusan	28 Mar 16	
9	KSU Karang Mandeh	1302110130001	22/BH/DKUP3/III/2016	Kmp. Baru Mandeh	28 Mar 16	
10	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Labuah Jaya	1302010010035	AHU-0003926.AH.01.26.TAHUN 2020		6/24/2020	
11	Koperasi Pemasaran Usaha Wanita Batu Hampa	1302110060001	AHU-0000682.AH.01.29.TAHUN 2023	Batu Hampa	14/02/2023	
12	KOPERASI PRODUSEN INDUSTRI KECIL MENENGAH KULEK MANDEH	1302110190001	AHU-0005078.AH.01.29.TAHUN 2023	Carocok Anau Ampang Pulai	04/12/2023	
13	KOPERASI PRODUSEN INTAN JAYA SAMUDERA	1302110190002	AHU-0005207.AH.01.29.TAHUN 2023	Carocok Anau Ampang Pulai	11/12/2023	
14	KPN SMPN 2 Pasar Baru	1302100020035	2125/BH/XVII	Pasar Baru	15-Apr-73	
15	KUD Pasar Baru	1302100020003	655b/BH/XVII	Pasar Baru	26-Nov-81	
16	Koperasi Pemasaran Gurun Panjang	1302100120004	984a/BH/XVII	Gurun Panjang	9-Jun-83	
17	Koperasi Punago Indah	1302100070037	19/BH/KDK.36/XII/2000	Koto Berapak	30-Dec-00	



18	Kop. Produsen Agro Pertanian Nan Jombang	1302100090001	AHU-0011163.AH.01.26.TAHUN 2021	Koto Baru Bayang	07/12/2021	
19	Koperasi Pemasaran Langong Maju Saiyo	1302015040001	AHU-0003322.AH.01.29.TAHUN 2022	Koto Berapak	27/06/22	
20	KOPERASI PEMASARAN KUBE BUNDO SARASAH	1302100070041	AHU-0003569.AH.01.29.TAHUN 2024	Koto Berapak	26/09/2024	
21	KPN Japsi	1302090020054	833/BH/XVII	Painan Utara Painan	19-May-73	
22	KPN Dispen Agama	1302090020071	730/BH/XVII	Painan	21-Feb-72	
23	KPN Dinas Kesehatan	1302090020056	726/BH/XVII	Painan	24-Jan-72	
24	KPN SMEA N Painan	1302090020062	752/BH/XVII	Painan	2-Jul-72	
25	KPN SMP N 1 Painan	1302090020068	1188/BH/XVII	Painan Utara Painan	30-Apr-79	
26	KPN Kantor Bupati	1302090020075	1220/BH/XVII	Painan	22-Oct-80	
27	KPN Dinas Pertanian	1302090210070	1398/BH/XVII	Painan selatan Painan	27-Apr-83	
28	KPN Makmur Lumpo	1302090070065	1467/BH/XVII	Lumpo	27-Jul-84	
29	KPN Kencana BKKBN	1302090020055	1691/BH/XVII	Painan	5-Nov-87	
30	KPN SMPN 2 Painan	1302090040021	1779/BH/XVII	Salido	5-Oct-88	
31	KPN Rutan	1302090020052	1674/BH/XVII	Painan	9-Nov-87	
32	KSU Pesisir Sejahtera	1302090020004	727/BH/XVII	Painan	31-Jan-72	
33	KPN Kejaksaan	1302090020041	1930/BH/XVII	Painan	10-Aug-89	
34	KPN RSUD Painan	1302090020061	2050/BH/XVII	Painan	14-Feb-92	
35	KPN Pengadilan Negeri Painan	1302090040058	2103/BH/XVII	Salido	29-Nov-92	
36	KPN SMA N 2 Painan	1302090220063	11/Kep/KWK.3/95	Painan Timur Painan	25-Jan-95	
37	KPN IV Jurai	1302090220074	723/BH/XVII	Painan Timur Painan	3-Jan-72	
38	KPN Depag Pessel	1302090020071	843/BH/XVII	Painan	16-Mar-73	
39	KOPKAR PDAM	1302090020044	60/KWK.3/XI/96	Painan	21-Jan-96	
40	Primkoppol	1302090020016	1086/BH/XVII	Painan	25-Jun-91	



41	Kop. Konsumen PKL	1302090210005	03/BH/DKUP3/III/14	Painan Selatan	26-Mar-14	
42	Kop. Iwapi Kab.Pessel	1302090020024	06/BH/KDK,36/III	Painan	12-Mar-03	
43	Kop. Lembaga Ekonomi Pengemb.	1302090020031	20/BH/KDK,36/XII	Painan	20-Dec-03	
44	KPRI Dinas Kimpraswil	1302090050050	5/BH/DKP.,3/III	Sago	29-Mar-04	
45	Koperasi Bongkar Muat ( Koperbam )	1302090210076	02/BH/DKP.3/II/07	Painan Selatan	12-Feb-07	
46	KUB Melati Pelaminan	1302090220007	26/BH/DKUP.2/XI/10	Painan Timur	30-Nop-10	
47	KSP Maj,Ta'Lim Mushl Darul Muthmainah	1302090220010	11/BH/DKUP.2/XI/10	Painan Timur	30-Nop-10	
48	KPRI Dinas Kehtn,Energi & SDM	1302090020011	01/BH/DKP.3/II/12	Painan	29-Feb-12	
49	KSP Koto Kaciak	1302090220010	01/BH/DKUP3/V/13	Painan Timur	22-May-13	
50	KSP Bangkit Bersama	1302090210014	02/BH/DKUP3/IX/13	Painan Selatan	03-Sep-13	
51	KPRI SMA N 3 Painan	1302090050001	013165/BH/M.KUKM.2/IV/2019	Sago Salido	23-Apr-19	
52	Koperasi Sawit Labuah Gajah	1302090190001	012348/BH/M.KUKM.2/II/2019	Bukik Kaciak Lumpo	25 Februari 2019	
53	Koperasi Pemasaran Pedagang Kreatif Lapangan Carocok Painan	1302090010002	AHU-0003611.AH.01.26.TAHUN 2020	Painan	5/18/2020	
54	Koperasi Konsumen Bahari SMK Negeri Dua Painan	1302090050051	AHU-0000708.AH.01.29.TAHUN 2023	Sago Salido	15/02/2023	
55	KPN Batang Kapas	1302080050019	1019/BH/XVII	Pasar Kuok	24-May-75	
56	KSP Khairun Nisak Tuik	1302080010024	05/BH/DKUP3/IV/14	Nagari Tuik	24-Apr-14	
57	KSU Saiyo Mandiri		17/BH/DKUP3/III/16	Taluak	28 Mar 16	
58	Kop Nelayan Tuo Sakato	1302080040001	20/BH/DKUP3/III/16	Koto Nan Tigo IV Koto Hilir	28 Mar 16	
59	Kop. Simpan Pinjam LKM-A Taluk Tigo Sakato	1302080040001	009777/BH/M.KUKM.2/IX/2018	Taluk Tigo sakato	27-Sep-18	
60	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Izzah Batang Kapas	1302080030001	AHU-0003227.AH.01.29.TAHUN 2022	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	24/06/22	
61	KPN Sutera	1302070020022	1480/BH/XVII	Surantih	28-Oct-84	
62	KJKS BMT El-Falah	1302070020006	02/BH/DKUP.2/II/10	Surantih	02/11/2010	



63	Koperasi Serba Usaha Bangkit Mandiri	1302070120007	09/BH/DKUP.2/XI/10	Ampalu	30-Nop-10	
64	Kop. Anisa Tahu Tempe	1302070020008	25/BH/DKUP.2/XI/10	Surantih	30-Nop-10	
65	KSU Bangun Bersama	1302070050016	27/BH/DKUP.2/XI/10	Taratak	30-Nop-10	
66	KOP. Pemasaran Pantai Camin	1302070030001	009469/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	Amping Parak	30/08/2018	
67	KSP Kelompok Wanita Tani Bina Sarana Perempuan	1302070060001	010063/BH/M.KUKM.2/X/2018	Taratak	11-Oct-18	
68	KOPERASI PRODUSEN MUTIARA DAUN GAMBIR	1302070060003	AHU-0003745.AH.01.29.TAHUN 2023	Koto Taratak	08/09/2023	
69	KPN Lengayang	1302060290061	941/BH/XVII	Kambang	26-Jun-71	
70	Koperasi Wanita Lakitan	1302060070047	01/BH/KDK.36/XI	Lakitan	7-Sep-98	
71	Kop Pedagang Psr Ternak Saiyo	1302060230060	06/BH/DKP.3/VIII	Koto Rawang	15-Aug-05	
72	Koperasi Pedagang Sepakat	1302060040059	15/BH/KDK,36/XI	Kambang	28-Nov-01	
73	Koptan Daratan Maranti (Koptadarma)	1302060090057	76/BH/KDK.36/IX	Pulai	25-Sep-99	
74	Kopontren Khairull Hasanah	1302060090044	07/BH/KDK.36/V	Lakitan	27-May-00	
75	KPN SMU Lengayang	1302060290061	14/BH/KDK.36/XI	Kambang Barat	25-Nov-00	
76	KSU AI Uswah	1302060090049	06/BH/KDK,36/VII	Lakitan	16-Jul-01	
77	KUD Kambang I	1302060040028	952/BH/XVII	Kambang	18-Jul-74	
78	Kop. Pemasaran Pedagang Ternak Usaha Bersama	1302060080038	13/BH/DKP.3/XI/05	Lakitan Timur	21-Nov-05	
79	Kop. Al-Hikmah	1302060090063	04/Bh/DKP.3/III/08	Lakitan	31-Mar-08	
80	KSP Satu Hati	1302060070020	08/BH/DKUP3/VIII/14	Lakitan Selatan	7-Aug-14	
81	Kop. Syariah Berkah Bersama (KSBB)	1302060030014	09/BH/DKUP3/VIII/14	Kambang Timur	7-Aug-14	
82	Kop Nelayan Sepakat	1302060050001	07/BH/DKUP3/II/16	Kambang Barat	26 Feb 16	



83	Kop Nelayan Sampan Dayung	1302060060001	18/BH/DKUP3/II/16	Lakitan Utara	28 Maret 16	
84	Koperasi Pemasaran Persatuan Pedagang Sejahtera	1302060060002	AHU-0004085.AH.01.29.TAHUN 2022	Lakitan Utara	04/08/2022	
85	KUD Pelangai	1302050120020	1102/BH/XVII	Pelangai	20-Sep-76	
86	KSP Pegawai Republik Indonesia Ranah Pesisir	1302050010024	1363/BH/XVII	Pelangai	17-Nov-82	
87	Koptan Harapan Maju ( koptarama )	1302050010018	37/BH/KDK.36/V	Sungai Tunu	11-May-99	
88	Kop. Tani Ternak Gading sepakat	1302050090012	12/BH/DKP.3/VII/08	Sungai Tunu	7-Juli-08	
89	Kop.Ternak Makmur Bersama (KTMB)	1302050090016	03/BH/DKUP.2/I/09	Sungai Tunu	20-Jan-09	
90	Kop Nelayan Jaya Bersama	1302050100001	03/BH/DKUP3/II/16	Sungai Tunu	26 Feb 2016	
91	KSU Batang Pelangai	1302050080001	05/BH/DKUP3/II/16	Pelangai Kaciek	26 Feb 2016	
92	Kop Nelayan Beringin Sakti	1302050030001	16/BH/DKUP3/II/16	Nyiur Melambai Pelangai	28 Maret 2016	
93	KSU Laut Berkah	1302050100002	26/BH/DKUP3/III/16	Sungai Tunu Barat	28 Maret 2016	
94	KSU Kato Saiyo	1302080020001	27/BH/DKUP3/III/16	Pasia Pelangai	28 Maret 2016	
95	KSU Ombak Tapi	1302050040002	28/BH/DKUP3/III/16	Pasia Pelangai	28 Maret 2016	
96	Kop Mawar Serumpun	1302050100003	25/BH/DKUP3/III/16	Sungai Tunu Barat	28 Maret 2016	
97	KSU Saiyo Mangko manjadi	1302050040003	003 029/ BH/M.KUKM.2/17	Padang Laban	1 Februari 2017	
98	Kop. Pasar Labuhan Pasia Palangai	1302050040004	009168/BH/M.KUKM.2/VII/2018	Pasia Pelangai	30-Jul-18	
99	KSU Kato Nan Basamo	1302050040005	010485/BH/M.KUKM.2/XI/2018	Pasia Pelangai	13-Nov-18	
100	Kop. Jasa LKMA Sungai Liku	1302050050001	011890/BH/M.KUKM.2/I/2019	Sungai Liku Pelangai	29 Januari 2019	
101	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) BIOFERA ARTA	1302050010025	011141/BH/M.KUKM.2/XII/2018	Pelangai	14 Desember 2018	



	MANDIRI					
102	KOPERASI PEMASARAN GUNUNG MAS PELANGAI KACIAK	1302050120025	AHU-0001879.AH.01.29.TAHUN 2024	Pelangai	08/06/2024	
103	Koperasi Tunas Baru	1302040050030	28/BH/KDK.36/XII	Punggasan	30-Dec-00	
104	Koperasi Jaya Abadi Sakato	1302040060028	05/BH/KDK.36/IV	Punggasan	4-Apr-00	
105	KPN Guru LSB	1302040140029	07/BH/KDK.36/IV	Air Haji	19-Apr-02	
106	Koperasi Pemasaran Perikanan Alun Selatan	1302040080027	12/BH/DKP.3/VI	Air Haji	26-Jun-03	
107	Koperasi Simpan Pinjam Kampung Tarandam Lagan	1302040050001	04/BH/DKUP.3/VIII/15	Punggasan	25 Agus 15	
108	Koperasi Kemadang Palm	1302040150001	002457/BH/M.KUKM2/XI/2016	Muaro Gadang Air Haji	1 Nov 2016	
109	KSU Peduli Sahabat Mandiri	1302040120001	002598/BH/M.KUKM2/XI/2016	Air Haji	14 Nov 2016	
110	Koperasi Perikanan Suci Samudera	1302040120002	011954/BH/M.KUKM.2/II/2019	Air Haji Barat	4 Februari 2019	
111	Kop. Produsen Wanita Rumput Laut Moaro Gadang Air Haji	1302040080001	10/BH/KDK.36/II/03	Air Haji	02/02/2003	
112	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SERBA USAHA MARDHATILLAH MADANI	1302040080028	AHU-0006150.AH.01.29.TAHUN 2022	Air Haji	18/11/2022	
113	Koperasi Tani Tetesan Embun	1302140020008	02/PAD/DKUP.3/V/13	Hilalang Panjang	1 Mey 2013	
114	Kop Nelayan Berlian Samudera	1302140040001	08/BH/DKUP3/II/16	Inderapura	26 Feb 2016	
115	Kop. Intan Sama Rasa	1302140040002	003952/BH/M.KUKM.2/IV/2017	Indrapura, Airpura	12-Apr-17	
116	Kop. Pemasaran Saiyo Harapan Bersama	1302140050001	008814/BH/M.KUKM.2/VII/2018	Tluk Kualo, Indrapura, Airpura	2-Jul-18	
117	Kop.Jasa LKM-A Gapoktan Samo Saiyo	1302140100001	009775/BH/M.KUKM.2/IX/2018	Indrapura, Airpura	27/09/2018	
118	KJKS Jamiatur Rahmah	1302140020001	05/BH/DKUP.3/IX/15	Inderapura Timur	21 Sept 2015	



119	Kop. Jasa LKM-A Damar Rumput Jaya	1302140070001	009776/BH/M.KUKM.2/IX/2018	Inderapura, Airpura	27/09/2018	
120	Koperasi Tuah Saiyo Sakato	1302140050002	014287 /BH/M.KUKM.2/VIII/2019	Tluk Kualo Inderapura	6 Agustus 2019	
121	Kop. Pemasaran Bukit Jaya Mandiri	1302140070002	015096/BH/M.KUKM.2/IX/2019	Palokan Inderapura	22-Sep-19	
122	Koperasi Produsen Nelayan Pulau Rajo	1302140040003	AHU-0005306.AH.01.26.TAHUN 2020	Airpura	9/16/2020	
123	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Tunas Baru	1302140090001	AHU-0007078.AH.01.26.TAHUN 2020	Airpura	12/05/2020	
124	Kop. Produsen Nelayan Kilauan Tanjung Pulau	1302140040004	AHU-0011622.AH.01.26.TAHUN 2021	Pulau Rajo Airpura	08/10/2021	
125	Kop. Produsen Cahaya Air Pilah	1302140040005	AHU-0012102.AH.01.26.TAHUN 2021	Pulau Rajo	09/09/2021	
126	Kop. Pemasaran Riak Aie Uba	1302140040007	AHU-0001644.AH.01.29.TAHUN 2022	Pulau Rajo	9 Mei 2022	
127	Koperasi Produsen Daulat Tani Rakyat	1302140060002	AHU-0001001.AH.01.29.TAHUN 2023	Tanah Bakali	04/03/2023	
128	KOPERASI PRODUSEN DAMAR LAPAN BATANG	1302140110001	AHU-0003825.AH.01.29.TAHUN 2023	Damar Lapan Batang	13/09/2023	
129	KPN Indera Pura	1302030060030	1369/BH/XVII	Kudo-kudo	18-Nov-98	
130	Koperasi Pemasaran Serba Usaha Bina Warga Inderapura	1302030060027	17/BH/KDK.36/III	Kudo - kudo	13-Mar-99	
131	KSU Taqwa Inderapura Barat	1302030040010	11/BH/KDK.36/II	Inderapura Barat	27-Feb-99	
132	KSU Cipta Mandiri	1302030050019	12/BH/DKP.3/XII/06	Inderapura	12-Dec-06	
133	KSU Wana Lestari	1302030010012	06/BH/DKUP.2/XI/10	Inderapura Selatan	30-Nop-10	
134	Kop Amanah	1302030040001	04/BH/DKUP3/II/16	Inderapura Barat	26 Feb 2016	
135	KSU Inderapura Makmur	1302030020003	29/BH/DKUP3/III/16	Muaro Sakai	28 Maret 2016	
136	Kop. Peasaran Usaha Mandiri	1302030020001	30/BH/DKUP3/III/16	Muaro Sakai	28 Maret 2016	



	Samudera					
137	Kop. Perikanan Nila Permata	1302030050001	004401/BH/M.KUKM.2/VI/2017	Indrapura Pancung soal	12 Juni 2017	
138	Koperasi Produsen Perikanan Cahaya Samudera	1302030010032	AHU-0004811.AH.01.26.TAHUN 2020	Kudo - kudo	8/24/2020	
139	KOPERASI PRODUSEN PERMATA GURAMI INDSEL	1302030070001	AHU-0000426.AH.01.29.TAHUN 2024	Indrapura Selatan	06/02/2024	
140	Koperasi Produsen KUD Tapan	1302020010005	057/BH/XVII	Tapan	13-Jun-74	
141	KPN Tapan	1302020110001	1696/BH/XVII	Tapan	23-Nov-87	
142	KPN SMA Negeri I Basa IV Balai Tapan	1302020090008	10/BH/DKUP.2/V/09	Tapan	28-Mei-09	
143	Kop. Produsen Cermin Keluarga Sejahtera	1302020090001	010419/BH/M.KUKM.2/XI/2018	Koto Anau	06-Nov-18	
144	Koperasi Produsen Unit Desa Bukit Buai Indah	1302020010011	AHU-0002250.AH.01.26.TAHUN 2020	KAMPUNG AIR DINGIN	2/14/2020	
145	Koperasi Produsen Alam Sejahtera Bersama	1302020110002	AHU-0006959.AH.01.26.TAHUN 2020	Koto Anau Tapan	12/01/2020	
146	KOPERASI PEMASARAN LABUAN INDAH MAJU	1302020090009	AHU-0003605.AH.01.29.TAHUN 2023	Koto Enau	31/08/2023	
147	Koperasi Produsen Sidorejo	1302010020001	1006/BH/XVII	Lunang	2-Apr-75	
148	KPN Lunang Silaut	1302010040003	1708/BH/XVII	Lunang	13-Jan-82	
149	Kop RMP Saiyo KTM Lunang Silaut	1302010070001	02/BH/DKUP3/II/16	Pondok Parian Lunang	26 Feb 2016	
150	Kop Usaha Bersama Bina Usaha Mandiri	1302010100001	13/BH/DKUP3/III/16	Lunang Dua	28 Maret 2016	
151	KSU Setia Kawan Bersama		010308/BH/M.KUKM.2/X/2018	Sindang	25-Oct-18	
152	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Usaha Makmur		AHU-0004193.AH.01.26.TAHUN 2020	Kamp. Tanjung Raya	7/14/2020	
153	KSP Melati Jaya Mandiri		AHU-0009218.AH.01.26.TAHUN 2021	Sindang Lunang	3/20/2021	



154	Kop. Produsen Matiko Kristal Laut	1302010010036	AHU-0010715.AH.01.26.TAHUN 2021	Lunang	6/14/2021	
155	Kop. Produsen Amanah Alam Semesta	1302010030027	AHU-0011095.AH.01.26.TAHUN 2021	Lunang	07/07/2021	
156	Kop. Produsen Unit Desa Karya Tani	1302010090001	AHU-0007205.AH.01.26.TAHUN 2020	Lunang Satu	11/12/2020	
157	Kop. Pemasaran Tanjung Beringin Ujung	1302010010037	AHU-0013183.AH.01.26.TAHUN 2021	Lunang	05/11/2021	
158	Kop. Produsen Petani Mulya Sejahtera	1302010040004	AHU-0001930.AH.01.29.TAHUN 2022	Lunang Selatan	18 Mei 2022	
159	Kop. Konsumen Usaha Tani Bersinar	1302010110002	AHU-0001570.AH.01.29.TAHUN 2022	Lunang Tiga	28/04/2022	
160	Koperasi Produsen Jaya Basamo Lunang Sakti	1302015030001	AHU-0003002.AH.01.29.TAHUN 2023	Lunang Selatan	27/07/2023	
161	KOPERASI PRODUSEN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM LUNANG	1302010040006	AHU-0002483.AH.01.29.TAHUN 2023	Lunang Selatan	26/06/2023	
162	KOPERASI PRODUSEN NAGARI TIGO SERANGKAI	1302010080001	AHU-0003604.AH.01.29.TAHUN 2023	Lunang Tengah	31/08/2023	
163	KOPERASI PRODUSEN LINTANG LUNANG SELATAN	1302010040007	AHU-0004830.AH.01.29.TAHUN 2023	Lunang Selatan	16/11/2023	
164	Koperasi Konsumen Jaya Bersama	1302015030001	14/BH/DKUP3/III/16	Sungai Sariak	28 Maret 2016	
165	KSU Buah Sakato Basamo	1302015120001	002611/BH/M.KUKM2/XI/2016	Sambungo Silaut	14 Nov 2016	
166	KSU Sukses jaya Mandiri	1302015130001	008211/BH/M.KUKM.2/IV/2018	Silaut	20-Apr-18	
167	Kop. Pemasaran Pasar Induk KTM Lunang Silaut	1302015090002	009466/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	Silaut	30 Agustus 2018	
168	KUB Nelayan Cahaya Bahari	1302015080001	009128/BH/M.KUKM.2/VII/2018	Durian Seribu	26-Jul-18	
169	KSU Mandiri Sejahtera	1302015100001	11/BH/DKUP3/III/16	Air Hitam Silaut	28 Maret 2016	
170	KSU Tumbuh Lestari	1302015050001	12/BH/DKUP3/III/16	Silaut	28 Maret 2016	



171	Kop Produsen Bina Usaha Batik	1302015090001	003157/BH/M.KUKM2/1/2017	Silaut	23-Jan-17	
172	Kop. Langgeng Jaya Sejahtera	1302015040001	010371/BH/M.KUKM.2/XI/2018	Sungai Pulai	11-Jan-18	
173	Kop. Pemasaran Silaut Maju Bersama	1302015130002	014310/BH/M.KUKM.2/VIII/2019	Silaut	6 Agustus 2019	
174	KOPERASI KONSUMEN MAJU KARYA BERSAMA LUBUK BUNTA	1302015090003	AHU-0001311.AH.01.29.TAHUN 2024	Lubuk Bunta	29/04/2024	
175	KOPERASI KONSUMEN ASIA PALM NUSANTARA	1302015100003	AHU-0003807.AH.01.29.TAHUN 2024	Air Hitam	11/10/2024	

Sumber :Data Keragaan Koperasi Tahun 2024 Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.



**Tabel 3.21**  
**Rekapitulasi Data Koperasi**

No	Tahun	Jlh Koperasi	Jlh Kop. Aktif	Jlh. Kop. Aktif Melaksanakan RAT	Persentase Koperasi Aktif (%)	Persentase Kop. Aktif Melaksanakan RAT
1	2015	297	185	66	62,29	35,68
2	2016	333	221	66	66,37	29,86
3	2017	275	172	73	62,55	42,44
4	2018	302	122	89	40,40	72,95
5	2019	309	136	114	44,01	83,82
6	2020	312	139	95	44,55	68,34
7	2021	319	145	80	45,46	25,08
8	2022	326	154	72	47,24	46,75
9	2023	337	165	61	48,96	36,97
10	2024	344	175	76	50,87	43,43

**3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022**

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022**  
**Persentase Koperasi Berkualitas**

Indikator kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Koperasi berkualitas	18	20	35	15,64	32,12	32,57	86,89	160,60	93,06

Dilihat dari tabel diatas, peningkatan capaian persentase koperasi berkualitas dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sangat signifikan disebabkan karena perubahan formula sebelumnya penyebutnya adalah **jumlah koperasi keseluruhan**, berdasarkan evaluasi Tim LPPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, penyebutnya diganti dengan **jumlah koperasi aktif**.



**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Jumlah Koperasi yang Meningkatkan**  
**Berdasarkan RAT, Volume dan Asset Tahun 2022 s/d 2024**

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset	51	53	57
2	Jumlah Koperasi aktif	154	165	175
3	Jumlah Koperasi	326	337	344

Pada tahun 2024, jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset bertambah dibandingkan dengan tahun 2023. Dilihat dari realisasi kinerja jika dibanding dengan tahun 2022 dan 2023, juga mengalami peningkatan walaupun hanya sebesar 0,45%. Sedangkan jika dilihat dari capaian kinerja kelihatannya menurun drastis pada tahun 2024, hal ini disebabkan oleh penetapan target pada Indikator Kinerja Utama belum disesuaikan dengan perubahan formula dari Tim Evaluator LPPD. Pada tanggal 25 Oktober 2023, SK IKU sudah dilakukan revisi, sehingga penetapan target tahun 2024 berpedoman kepada capaian kinerja tahun 2023.

### **3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target s/d Periode Renstra**

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja s/d**  
**Periode Renstra Sasaran 3**

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Koperasi Berkualitas	%	37	32,57	88,03	Akan tercapai sama atau lebih dari 100%

Dilihat dari tabel diatas, jika dibandingkan antara target akhir renstra dengan realisasi kinerja tahun 2024, capaian kinerja mencapai angka 88,03%.



### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 3.25

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Diskopnaker Kab. Pesisir Selatan	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar	Kemenkop dan UKM RI
Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	32,57	34,26	8,43

Tabel 3.26

#### Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

#### Tahun 2021-2024

VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional.								
MISI Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional.								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target			
					2021	2022	2023	2024
		<b>Mendukung Perekonomian Nasional</b>						
		Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	%	5	7,5	7,5	10 (30 akumulatif)
			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	14	16	18	20
			Jumlah Koperasi Modern	Unit	100	150	150	100 (500 akumulatif)

Tabel 3.1.

#### Capaian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Keterangan	Renstra 2021 - 2024		
					Target	Realisasi	% Capaian		Target Akhir 2024	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
SSU	(SU) Kontribusi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	%	6,20%	5,30%	6,07%	114,53%	Diatas target	5,50%	6,07	110,36%
		Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	%	*)	63%	*)	*)	*)	65%	*)	*)
		Rasio Kewirausahaan Nasional	%	2,89%	3,17%	2,86%	90,22%	Dibawah target	3,95%	2,86%	72,40%
SS1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	%	5,49%	7,5%	8,5%	113,3%	Diatas target	10% (30% kumulatif)	8,41% (13,99% kumulatif)	46,63%
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	34,14%	10%	8,51%	85,1%	Dibawah target	20%	8,51%	42,55%
		Jumlah Koperasi Modern	Unit	100	150	150	100%	Sesuai target	100 (500 kumulatif)	150 (250 kumulatif)	50%

Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2021-2024 indikator persentase koperasi berkualitas ditargetkan sebesar 10% pada tahun



2024 dengan realisasi 8,43% dengan capaian kinerja sebesar 84,3%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, capaian kinerja sebesar 93,06%, berarti capaian kinerja Persentase koperasi berkualitas secara nasional lebih tinggi 8,76% dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

### **3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Aternatif Solusi yang telah dilakukan**

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan usaha terutama unit usaha simpan pinjam adalah sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemacetan pada koperasi  
Penyebab tingginya angka kemacetan pada koperasi, yaitu :
  - a. Rendahnya kesadaran anggota untuk membayar kewajibannya.
  - b. Lemahnya aturan internal yang mengikat pada koperasi.
  - c. Kurang profesionalnya Pengurus/Pengawas/Pengelola dalam mengelola usaha koperasi dan hanya merupakan pekerjaan sampingan.
2. Persaingan dengan BUMN/perbankan, dimana tingkat suku bunga bank lebih rendah dari tingkat suku bunga yang ada dikoperasi, sehingga anggota yang tergabung pada koperasi pada umumnya meminjam ke bank, bahkan dikoperasi mengalami kemacetan.
3. Terbatasnya permodalan koperasi
4. Rasa memiliki anggota terhadap koperasi sangat rendah, sehingga kemauan untuk memajukan koperasi juga sangat rendah.
4. Terbatasnya personil yang kompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi.
5. Usaha koperasi masih didominasi oleh unit usaha simpan pinjam, sementara koperasi yang bergerak disektor riil masih relatif sedikit.

Faktor keberhasilan peningkatan koperasi berkualitas :

1. Meningkatnya kinerja koperasi, baik dari segi kelembagaan maupun usaha koperasi
2. Meningkatnya kesadaran pengelola koperasi sebagai anggota koperasi
3. Adanya komitmen bersama antara pengurus dan anggota koperasi untuk melakukan terobosan baru dan secara kontinu mengembangkan usaha koperasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi, yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi baik secara langsung

(kunjungan pembinaan ke lapangan) maupun secara tidak langsung (melalui media sosial)

2. Memberdayakan Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM.
3. Memberikan penyuluhan baik formal maupun informal.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
5. Memberikan kemudahan pemberian rekomendasi pinjaman ke Koperasi Sekunder.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Pengurus Koperasi melalui Dana DAK Non Fisik sebanyak 2 (dua) angkatan seperti gambar dibawah ini :

**Gambar 3.5 Pelatihan Perkoperasian Pola Syariah Bagi  
Pengurus Koperasi Se Kab Pessel Tanggal 20 s/d 22 Mei 2024**





**Gambar 3.6 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Perkoperasian bagi  
Pengurus Koperasi se Kab. Pessel Tanggal 28 s/d 30 Mei 2024**





### 3.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran strategis ke-3 ini dengan 1 indikator didukung oleh 3 program dengan 3 kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.27

#### Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Koperasi Berkualitas

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kesehatan koperasi	unit usaha	30	30
2	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberdayaan usaha koperasi	unit usaha	20	20
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	unit usaha	56	56



**Tabel 3.28**  
**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja**  
**Persentase Koperasi Berkualitas**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.360.000	36.346.850	94,75
2.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	619.615.000	599.079.150	96,69
3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	138.640.000	137.709.300	99,33
	Jumlah	796.615.000	773.135.300	97,05

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya koperasi berkualitas ditunjang oleh 3 program dan 3 kegiatan seperti tabel diatas dengan pagu anggaran sebesar Rp.796.615.000,- yang terealisasi sebesar Rp.773.135.300,- atau 97,05%. Terdapat silpa sebesar Rp.23.479.700,- namun realisasi fisiknya mencapai 100%, berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,95%.

### 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.29**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	35%	32,57%	93,06	796.615.000,-	773.135.300,-	97,05%	0,04



Dilihat dari tabel diatas, jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran, terdapat efisiensi sebesar 0,04%.

Sasaran Strategis meningkatnya koperasi berkualitas merupakan indikator yang berkaitan langsung dengan Bidang Koperasi dan UKM. Untuk meningkatkan kualitas koperasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dipimpin oleh Kabid Koperasi dan UKM dengan dibantu oleh beberapa orang personil, yaitu :

- Pejabat fungsional penyetaraan : 2 orang
- Staf : 2 orang
- PPKL (Non ASN) : 3 orang
- Tenaga Pendamping Koperasi (Non ASN) : 1 orang
- Jumlah 8 orang

Dilihat dari jumlah personil yang ada jika dibandingkan dengan jumlah koperasi keseluruhan, sebenarnya masih jauh dari kata memadai. Disamping itu juga keterbatasan serta latar belakang pendidikan pembina yang beragam. Namun dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan dengan memberdayakan personil sebanyak 9 orang (5 orang ASN, 4 orang Non ASN), mampu meningkatkan kinerja koperasi dengan trik-trik yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Untuk Non ASN (PPKL dan Tenaga Pendamping Koperasi), wilayah binaannya dibagi per kecamatan dan dievaluasi kinerjanya 1 kali seminggu.
- c. Untuk ASN, melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkala ke koperasi-koperasi. Mengingat anggaran yang terbatas, maka pembinaan dan pengawasan koperasi dilakukan dengan skala prioritas, dengan kata lain jika koperasi tersebut bermasalah, pembinaannya lebih diintensifkan.
- d. Dengan memanfaatkan media online (whatsapp), mekanisme layanan dapat lebih ditingkatkan tanpa menggunakan biaya dan melibatkan banyak orang.

#### Sasaran 4 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan

##### 4.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.30

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya daya saing sektor unggulan	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	78	79,12	101,44



**Tabel 3.31**  
**DATA USAHA MIKRO MENJADI WIRAUSAHA**  
**TAHUN 2021 - 2024**

Tahun	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha (Unit)	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha
2021	3.922	5.599	70,05%
2022	7.381	10.251	72,00%
2023	8.589	11.403	75,32%
2024	9.850	12.450	79,12%

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pessel

**Tabel 3.32**  
**REKAPITULASI DATA UMKM PER-SEKTOR TAHUN 2024**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO.	SEKTOR EKONOMI	USAHA MIKRO	USAHA KECIL	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Agrobisnis	920	4	<b>924</b>
2	Fashion	334	1	<b>335</b>
3	Jasa	365	11	<b>376</b>
4	Kerajinan	103	0	<b>103</b>
5	Kuliner	4.081	3	<b>4.084</b>
6	Otomotif	213	3	<b>216</b>
7	Pendidikan	35	0	<b>35</b>
8	Perdagangan	5.372	34	<b>5.406</b>
9	Perikanan	358	1	<b>359</b>
10	Peternakan	449	2	<b>451</b>
11	Lainnya	220	0	<b>220</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.450</b>	<b>59</b>	<b>12.509</b>

Secara umum data perkembangan dan kinerja UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan



mengalami peningkatan. Perkembangan UMKM menunjukkan trend yang positif dengan adanya peningkatan setiap tahunnya. Sebagaimana kita ketahui, posisi UMKM sejak dulu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM berperan berkontribusi dalam pertumbuhan PDB, perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi.

**Tabel 3.33**  
**REKAPITULASI DATA UMKM TAHUN 2024**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH UMKM	USAHA MIKRO	USAHA KECIL	OMSET (Rp.)	ASSET (Rp.)	TENAGA KERJA (Orang)		JUMLAH TENAGA KERJA
							LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KOTO XI TARUSAN	2.200	2.197	3	24.437.385.000	68.356.547.000	2.498	1.194	3.692
2	BAYANG	1.756	1.750	6	46.289.063.000	154.484.559.000	2.260	550	2.810
3	IV NAGARI BAYANG UTARA	333	330	3	11.802.020.000	45.626.461.000	483	56	539
4	IV JURAI	1.356	1.342	14	39.609.055.000	161.705.324.000	1.888	580	2.468
5	BATANG KAPAS	337	344	-	5.533.936.000	13.301.875.000	370	129	499
6	SUTERA	1.357	1.348	9	24.002.676.000	94.976.069.000	2.016	299	2.315
7	LENGAYANG	2.535	2.531	4	24.212.622.000	72.761.629.000	3.671	934	4.605
8	RANAH PESISIR	222	219	3	5.378.599.000	19.803.277.000	186	106	292
9	LINGGO SARI BAGANTI	409	406	3	13.560.769.000	48.692.265.000	452	260	712
10	AIRPURA	222	216	6	6.924.520.000	31.969.648.000	377	82	459
11	PANCUNG SOAL	257	260	-	4.000.019.000	13.227.897.000	388	109	497
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	486	483	3	9.258.24	30.666.38	600	129	729



					2.000	2.000			
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	140	139	1	4.488.04 5.000	19.008.29 3.000	245	120	365
14	LUNANG	746	743	3	16.467.3 54.000	58.850.86 0.000	969	381	1.350
15	SILAUT	143	142	1	4.063.78 7.000	15.936.04 4.000	150	32	182
<b>TOTAL</b>		<b>12.509</b>	<b>12.450</b>	<b>59</b>	<b>240.028. 092.000</b>	<b>849.367.1 30.000</b>	<b>16.55 3</b>	<b>4.961</b>	<b>21.514</b>

$$\begin{aligned} \text{\% usaha mikro yang} \\ \text{menjadi} \\ \text{wirausaha} &= \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang} \\ \text{menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro} \\ \text{keseluruhan}} \times 100\% = \frac{9.850}{12.450} \times \frac{100}{\%} = \frac{79,12}{\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

**Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:**

- Usaha Mikro** memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,-
- Usaha Kecil** memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari dari



Rp.2.000.000.000,- s/d 15.000.000.000,-

3. **Usaha Menengah** memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,- s/d 50.000.000.000,-

**4.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023**

**Tabel 3.34**

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023 Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha**

Indikator kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	72	75	78	72	75,32	79,12	100	100,43	101,44

Dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja sasaran 4 dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas SDM UMKM dan inovasi produk UMKM sehingga mampu bersaing dengan pangsa pasar.

**4.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada berita acara rasionalisasi renstra 2021-2026 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan**

**Tabel 3.35**

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai dengan Periode Renstra Sasaran 3**

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	82,00	79,12	96,48	Akan sama atau lebih dari 100%



Pada akhir renstra tahun 2026, Persentase usaha mikro menjadi wirausaha ditarget sebesar 82%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 79,12%, berarti dalam 2 tahun berikutnya masih ada target yang harus dicapai sebesar 2,88% lagi.

#### 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

**Tabel 3.36**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan**  
**Standar Provinsi dan Nasional**

Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pesisir Selatan	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar	Kemenkop dan UKM RI
Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	Persen	79,12	Data tidak tersedia karena kewenangan provinsi hanya untuk usaha kecil	3,08

Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	%	2,5	3	3,5	4
	Penumbuhan Start-Up	Start-up	50	100	150	200 (500 akumulatif)

Tabel diatas, merupakan salah satu indikator kinerja yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya UMKM. Pada tabel tersebut, indikatornya Persentase Pertumbuhan wirausaha, sedangkan indikator kinerja

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah Persentase Usaha Mikro Menjadi wirausaha, berarti angka pembandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat ditampilkan karena pengukuran kinerjanya berbeda.

#### 4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Aternatif Solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor penyebab keberhasilan peningkatan kinerja usaha mikro menjadi wirausaha antara lain :



1. Faktor internal :
  - a. Motivasi dari pelaku usaha sendiri
  - b. Pelaku usaha pada umumnya dari kalangan usia milenial yang masih produktif dan inovatif
  - c. Memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media untuk memasarkan produk
  - d. Jenjang pendidikan rata-rata minimal SLTA
  
2. Faktor eksternal :
  - a. Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha oleh Pemerintah atau pihak ketiga
  - b. Fasilitasi permodalan
  - c. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memajukan UMK, antara lain :

1. Kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM
2. Penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan.
3. Meningkatkan peluang usaha produk UMKM.
4. Memberikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
5. Memberikan insentif bagi Wirausaha Pemula.
6. Fasilitasi kemudahan untuk mendapatkan Sertifikat halal dan merk.

Dibawah ini adalah gambar pelatihan bagi para pelaku usaha dengan berbagai jenis pelatihan yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik.

**Gambar 3.7 Pelatihan Keterampilan Kerajinan (P3KE) Membatik bagi Pelaku Usaha UMKM se Kab. Pessel Tanggal 20 s/d 22 Agustus 2024**



**Gambar 3.8 Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan (P3KE) “Pelatihan Rendang Ikan dan Lokan bagi Pelaku UMKM se Kab. Pessel Tanggal 18 s/d 20 September 2024**



Gambar 3.9 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 2024





#### 4.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**Tabel 3.37**  
**Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 4**  
**(Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan)**

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pendataan UMKM	unit usaha	1.000	1.002
2	PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	unit usaha	10	10

**Tabel 3.38**  
**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja**  
**Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	407.000.160	406.191.140	99,80
2.	Pengembangan UMKM	15.000.000	14.724.000	98,16
	Jumlah	422.000.160	420.915.140	99,74



Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 4 terdiri dari 2 program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.422.000.160,- yang terealisasi sebesar Rp. 420.915.140,- atau 99,74%. Dilihat dari tabel diatas, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.085.020,- (0,26%), sedangkan realisasi target tercapai 100%.

#### 4.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.39**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	78,00%	79,12%	101,44	422.000.160,-	420.915.140,-	99,74%	1,7

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai target dengan memanfaatkan alokasi anggaran, SDM, mekanisme layanan dan lain sebagainya.

Pada sasaran 4 ini, Jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran, terdapat efisiensi sebesar 1,7%. Disamping adanya efisiensi anggaran, dengan keterbatasan SDM mampu mewujudkan realisasi kinerja melebihi 100%. Persentase usaha mikro menjadi wirausaha merupakan tanggungjawab Bidang Koperasi dan UKM dibawah kepemimpinan Kabid Koperasi dan UKM dengan dibantu oleh beberapa orang ASN maupun Non ASN, yaitu :

- Pejabat fungsional penyetaraan : 1 orang
  - Staf (ASN) : 1 orang
  - Tenaga Pendamping UMKM (Non ASN) : 2 orang
  - Petugas Enumerator Data (Non ASN) : 2 orang
- Jumlah 6 orang

Dari jumlah SDM yang tersedia diatas, jelas terlihat efisiensi penggunaan SDM jika dibandingkan dengan perkembangan UMKM yang trendnya cenderung meningkat. Pelaku UMKM tersebut perlu dilakukan pendataan dan pembinaan agar



pelaku usaha berkualitas dan berdaya saing.

Jumlah UMKM yang terdata pada tahun 2024 sebanyak 12.509 pelaku usaha. Dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas, baik dari segi ketersediaan anggaran maupun personil pembina, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan layanan prima kepada para pelaku usaha. Disamping itu mekanisme layanan yang tidak begitu berbelit-belit serta memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih banyak UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum terdata dan terbina, namun Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas.

Pada tahun 2023, Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dialokasikan untuk Pembangunan PLUT KUMKM. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) adalah unit pelaksana teknis yang dibuat untuk meningkatkan kinerja produksi dan daya saing perekonomian melalui koperasi dan UMKM.

PLUT hadir di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pintu pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Fungsi-fungsi PLUT sebagai berikut :

### **1. Pelayanan Informasi dan Konsultasi**

PLUT menyediakan informasi tentang berbagai aspek usaha, perizinan, perpajakan, peluang bisnis, regulasi terbaru, dan lain-lain kepada pelaku usaha. Mereka juga memberikan konsultasi kepada pelaku usaha yang memerlukan panduan terkait bisnis mereka

### **2. Perizinan dan Administrasi**

PLUT dapat membantu pelaku usaha dalam proses perizinan dan administrasi yang dibutuhkan untuk memulai maupun mengembangkan bisnis. Baca juga: Teten Sebut PLUT jadi Alat Pemerintah Wujudkan Transformasi Ekonomi Nasional Dalam hal ini, PLUT dapat memberikan panduan mengenai persyaratan perizinan, formulir yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti.

### **3. Pemberian Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan**

PLUT seringkali mengadakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan untuk pelaku usaha. Ini dapat mencakup pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan aspek-aspek lain yang relevan.



#### **4. Pengembangan Pasar**

PLUT dapat membantu pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka melalui berbagai program, pameran, atau kegiatan promosi. Mereka dapat membantu menghubungkan pelaku usaha dengan pasar lokal, nasional, atau internasional.

#### **5. Bimbingan Teknis**

Pelaku usaha dapat mendapatkan bimbingan teknis tentang cara meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan peningkatan proses produksi.

#### **6. Pembiayaan dan Akses ke Dana**

Melalui PLUT, pelaku UMKM dapat menerima informasi tentang opsi pembiayaan yang tersedia, termasuk pinjaman, hibah, atau program insentif pemerintah. PLUT juga dapat membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan pembiayaan.

#### **7. Penghubungan dengan Lembaga Keuangan**

PLUT dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan seperti bank atau koperasi untuk mendiskusikan solusi pembiayaan.

#### **8. Advokasi dan Pendampingan**

PLUT pun dapat berperan sebagai advokat dan pendamping bagi pelaku usaha, terutama dalam mengatasi masalah dan hambatan yang mungkin tengah dihadapi dalam menjalankan bisnis.

#### **9. Pengumpulan Data dan Analisis**

PLUT dapat mengumpulkan data ekonomi dan bisnis di wilayah terkait untuk mendukung pengambilan keputusan strategis bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah.

#### **10. Pengembangan Jaringan Bisnis**

PLUT memfasilitasi pembentukan jaringan bisnis antara pelaku usaha di daerah yang dapat membantu dalam pertukaran informasi dan peluang kerjasama. PLUT bertujuan untuk menjadi pusat layanan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah bagi pelaku usaha.

Diharapkan para pelaku UMKM dan Koperasi dapat memanfaatkan PLUT KUMKM ini sesuai dengan fungsinya, sehingga Koperasi dan UMKM dapat maju dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah

Gambar 3.10 Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM



Dengan adanya Gedung PLUT-KUMKM ini, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sangat terasa karena di Gedung PLUT ini tersedia 2 (dua) ruang pertemuan, sehingga pelatihan-pelatihan ataupun pertemuan yang diadakan tidak perlu lagi menyewa hotel. Disamping itu sebagai sarana untuk mempromosikan produk UMKM, malahan setiap malam minggu diadakan acara Pasar Kuliner yang menjual produk-produk UMKM dan hari minggu pagi senam bersama dan car free day tanpa dipungut biaya.

Gambar 3.11 Pemanfaatan Gedung PLUT-KUMKM





**Sasaran 5 : Menurunnya Pengangguran**

**5.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3.40**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,6	5,06	81,82

Sumber : Sakernas tahun 2024



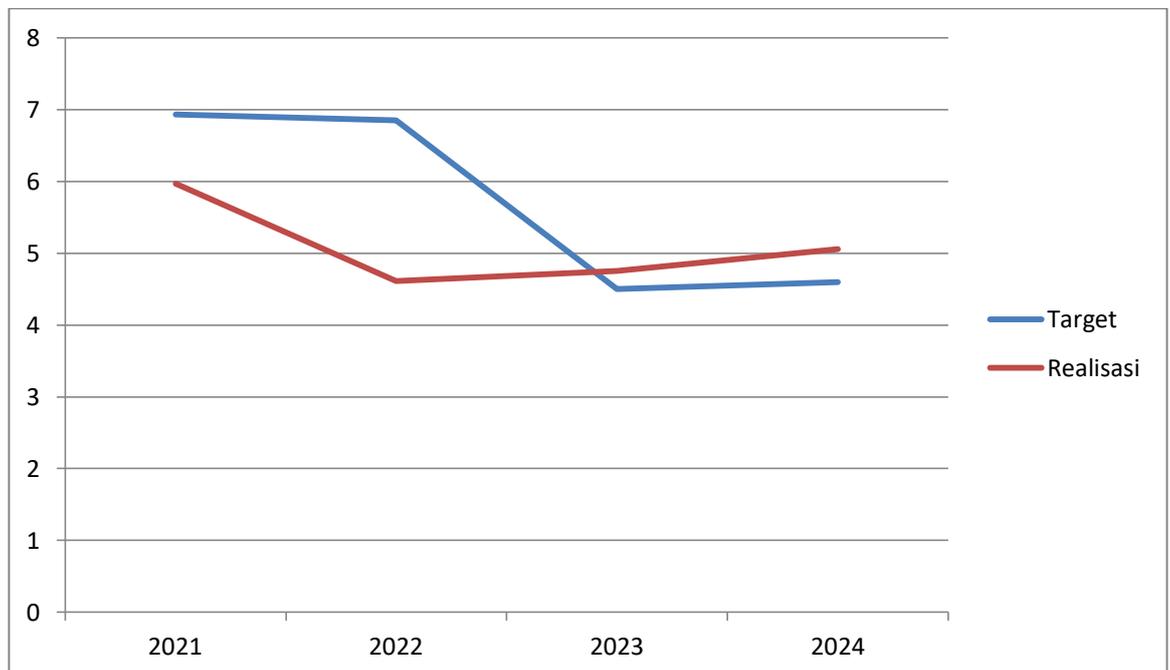
**Tabel 3.41**  
**Data Pengangguran dan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2021 s/d 2024**

Tahun	Pengangguran (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2021	13.516	226.320	5,97
2022	10.602	229.994	4,61
2023	12.188	256.424	4,75
2024	13.399	264.779	5,06

Sumber : Sakernas tahun 2024

**Grafik 3.1**

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka**



Pada tabel diatas, dapat dilihat kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2024, Tingkat Pengangguran terbuka pada tahun 2021 – 2022 terjadi penurunan. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan di tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 0,31% Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah. Upaya penciptaan lapangan kerja harus terus ditingkatkan agar tingkat pengangguran dapat semakin ditekan guna mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan pendataan BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Pesisir Selatan tahun ini tercatat sebesar 5,06% atau naik jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya 4,75%. Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 5,75%, maka Pesisir Selatan masih berada dibawah Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terbuka adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bekerja sama sekali.

**Pengangguran** yaitu :

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

## 5.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Tabel 3.42

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022  
Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator kinerja	satuan	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,85	4,50	4,60	4,61	4,75	5,06	132,70	89,47	81,82

Sumber : Data Sakernas tahun 2024



Dilihat dari tabel diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,31%. Sedangkan pada tahun 2023 jika dibanding dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,14%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Pertumbuhan ekonomi
- Upah
- Inflasi
- Investasi

**5.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada revisi berita acara rasionalisasi renstra 2021-2026 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan**

**Tabel 3.43**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai s/d Periode Renstra Sasaran 5**

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,95	5,06	95,65%	Akan sama atau lebih dari 100%

Dilihat dari tabel diatas, jika dibandingkan antara target akhir renstra dengan realisasi kinerja tahun 2024, terdapat Persentase capaian sebesar 95,65%.

**5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

**Tabel 3.44**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional**

Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,06	5,75	4,91

Sumber : Data Sakernas tahun 2022, 2023 dan 2024

Menurut BPS, pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Tinggi di Indonesia



sebesar 4,91%. dan rata-rata upah buruh sebesar Rp. 3.270.000,- per bulan. Angka ini turun 0,41% poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran terbuka adalah :

- Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja
- Jumlah pengangguran yang meningkat

Dilihat dari tabel diatas, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat nasional cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir, semenjak mencapai puncak tertinggi di awal pandemic covid-19. Jika dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Pesisir Selatan lebih rendah 0,69%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Kabupaten Pesisir Selatan Tingkat Pengangguran Terbuka lebih tinggi sebesar 0,15%.

Menurut BPS, pengangguran di Indonesia tersebut mencakup 4 kelompok penduduk yaitu :

- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha.
- Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.
- Penduduk yang sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja.

#### **5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Aternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab meningkatnya Pengangguran Terbuka, antara lain :

- Pertumbuhan ekonomi
- Upah
- Inflasi
- Investasi

Ada beberapa arah kebijakan yang digunakan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain :

- a. Meningkatkan implementasi PP dan PKB pada perusahaan.
- b. Meningkatkan mediasi kasus hubungan industrial
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
- d. Meningkatkan layanan bursa kerja
- e. Melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri.
- f. Training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja



g. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja

Ada beberapa upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah dilakukan, antara lain :

1. Semakin banyak program pelatihan kerja

Pemerintah memang sangat gencar dalam mengadakan program pelatihan kerja, baik program pelatihan tata rias, tata boga, garmen dsb. Saat masyarakat memiliki bakat atau kemampuan, maka mereka bisa semakin mandiri dan bisa mendapatkan penghasilan dari bakat yang dimiliki tersebut.

2. Menanamkan jiwa wirausaha

Karena jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka pemerintah berusaha untuk membuat masyarakat lebih mandiri dengan menjalani wirausaha. Saat menjalankan sebuah bisnis, maka masyarakat tidak hanya tergantung dengan lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Mereka justru akan lebih mandiri dalam menghasilkan pendapatan dengan bisnis yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan, nantinya para pengusaha ini bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang lain.

3. Faktor demografis, seiring meningkatnya populasi penduduk usia kerja.

4. Meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme.

5. Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di Luar Negeri.

6. Adanya jobfair (bursa kerja)

Faktor penghambat Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain :

1. Internal :

a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti : belum tersedianya penginapan bagi peserta pelatihan, sehingga pencari kerja yang dilatih hanya yang berada disekitar Kecamatan IV Jurai.

b. Terbatasnya Instruktur yang bersertifikat kompetensi.

c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pembina.

2. Eksternal :

a. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.

b. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja

c. Jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang kurang seimbang.

d. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

e. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak merata



- f. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor.
- g. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan keahlian, keterampilan dan produktifitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha dilaksanakan secara institusional di Balai Latihan Kerja (BLK).

Pada tahun 2024, ada beberapa pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan pengangguran seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.45**  
**Pelatihan Berbasis Kompetensi UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Painan**  
**Tahun 2024**

No	Jurusan Pelatihan	Jumlah Paket Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan
1	Garmen Apparel	1 paket	16 orang
2	Processing	2 paket	32 orang
3	Listrik	2 paket	32 orang
4	Tata rias	1 paket	16 orang
5	Las	3 paket	48 orang
6	Otomotif	3 paket	48 orang
7	Refrigeration	2 paket	32 orang
Jumlah			224 orang

Sementara itu pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) paket pelatihan yang bersumber dari APBD yang merupakan salah upaya Pemerintah Daerah untuk menurunkan pengangguran seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.46

Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Painan Tahun 2024

No	Jurusan Pelatihan	Jumlah Paket Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan
1	Tata Rias Pengantin	1 paket	35 orang
2	Tata Boga	1 paket	35 orang
Jumlah			70 orang

Sumber : UPTD BLK Painan

Gambar 3.12 Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 Januari s/d 12 Februari 2024





**Gambar 3.13 Pelatihan Fillet Welder SMAW 2F/PB yang dilaksanakan di Koto Berapak, Kec. Bayang pada tanggal 06 Februari s/d 04 Maret 2024**



**Gambar 3.14 Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (MTU) yang dilaksanakan di Nagari Tambang, Kec. IV Jurai, pada tanggal 05 Februari s/d 02 Maret 2024**



**Gambar 3.15 Pelatihan Asisten Pembuat Pakaian yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 Januari s/d 26 Februari 2024**



**Gambar 3.16 Pelatihan Tata Rias Pengantin Modifikasi Padang Pesisir Tahun 2024 di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 Januari s/d 26 Februari 2024**



**Gambar 3.17 Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 07 Mei s/d 22 Juni 2024**



**Gambar 3.18 Pelatihan Teknisi AC Residential yang dilaksanakan di UPTD  
BLK Painan, pada tanggal 07 Mei s/d 25 Juni 2024**



**Gambar 3.19 Pelatihan Fillet Welder SMAW 3F yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 07 Mei s/d 12 Juni 2024**



**Gambar 3.20 Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik bangunan Sederhana yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 05 Juni s/d 23 Juli 2024**



**Gambar 3.21 Pelatihan Teknisi Perawatan AC Residential yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 11 Juli s/d 12 Agustus 2024**



**Gambar 3.22 Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 11 Juli s/d 22 Agustus 2024**



**Gambar 3.23 Pelatihan Fillet Welder SMAW 3F/PF yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 11 Juli s/d 12 Agustus 2024**



**Gambar 3.24 Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 September s/d 06 November 2024**



**Gambar 3.25 Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue yang dilaksanakan di UPTD BLK Painan, pada tanggal 26 September s/d 17 Oktober 2024**



**Gambar 3.26 Pelatihan Tata Boga yang dilaksanakan di Hotel Saga Murni, pada tanggal 06 Maret s/d 08 Maret 2024**



**Gambar 3.27 Pelatihan Tata Rias Pengantin yang dilaksanakan di Hotel Hannah Syari'ah, pada tanggal 29 Februari s/d 02 Maret 2024**





Tabel 3.47

**DATA PENCARI KERJA (AK1 ) TAHUN 2024**

Terdaftar Menurut Tingkat Umur

No	Bulan	KELOMPOK UMUR										Jumlah		
		15 - 19		20 -29		30 - 44		45 -54		55+		L	P	JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Januari	4	1	17	13	3	0	0	0	0	0	24	14	38
2	Februari	21	11	2	3	1	0	0	0	0	0	24	14	38
3	Maret	3	3	9	3	2	0	0	0	0	0	14	6	20
4	April	16	23	55	34	2	0	0	0	0	0	73	57	130
5	Mei	7	9	57	42	2	1	0	0	0	0	66	52	118
6	Juni	24	42	19	30	1	1	0	0	0	0	44	73	117
7	Juli	43	53	19	33	0	2	0	0	0	0	62	88	150
8	Agustus	35	31	26	22	0	1	0	0	0	0	61	54	115
9	September	15	14	16	15	3	3	0	0	0	0	34	32	66
10	Oktober	9	12	20	21	1	0	0	0	0	0	30	33	63
11	November	7	8	17	25	0	1	0	0	0	0	24	34	58
12	Desember	8	9	11	26	3	1	0	0	0	0	22	36	58
	Total											478	493	971

Tabel 3.48

**Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Tahun	Dalam Negeri			Luar Negeri			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	2015	153	97	250	84	23	107	357
2	2016	122	158	280	113	19	132	412
3	2017	190	160	350	121	27	148	498
4	2018	1.842	1.978	3.820	151	114	265	4.085
5	2019	1.032	1.247	2.280	118	168	286	2.566
6	2020	-	-	-	-	-	-	-
7	2021	-	-	-	-	-	-	-
8	2022	833	914	1.747	22	39	61	1.808
9	2023	551	699	1250	35	27	62	1.312
10	2024							

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun 2024



Dilihat dari tabel diatas, data penempatan tenaga kerja ke luar negeri pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 – 2022.

**Tabel 3.49**  
**DATA BURSA KERJA KHUSUS (BKK)**  
**PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

No	Nama SMK	Alamat	NPSN	BKK		Ket
				Ada	Belum	
1	SMKS YP Tapan	Jl. Lunang-Silaut Sindang, Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kab. Pesisir Selatan	10301947	Ada		
2	SMKN 1 Pancung Soal	Jl. Sungai Aqhsa, Tigo Sungai Inderapura Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan	69773545	Ada		
3	SMKN 1 Linggo Sari Baganti	Jl. Simpang Lagan Punggasan Utara Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan	10310796	Ada		
4	SMKS E Adi Karya Linggo Sari Baganti	Jl. Rimbo Panjang-Air haji Aie Haji Ke. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan	10301940	Ada		
5	SMKN 1 Ranah Pesisir	Jl. Bukit Sangkar Puyuh-Balai Selasa Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	10301948	Ada		
6	SMKS Adi Karya Ranah Pesisir	Jl. Limau Sundai Balai Selasa Pelangai Gadang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	10310698	Ada		
7	SMKS Makmur Lengayang	Jl. Ujung Padang- Kambang Kambang Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan	10301941		Tidak	



8	SMKS Teknologi Lengayang	Jl. SMK Ujung Padang Kambang Kambang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	10301946		Tidak	
9	SMKN 1 Sutera	Jl. Raya Teratak-Surantih Km.36 Taratak Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan	10308258	Ada		
10	SMKN 1 Painan	Jl. Dr. Mohd. Hatta-Paian Painan Selatan Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	10301942	Ada		
11	SMKN 2 Painan	Jl. Jendral Sudirman Sago Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	10301949	Ada		
12	SMKS PGRI Painan	Jl. Perintis Kemerdekaan-Painan Selatan Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	10301943		Tidak	
13	SMKS Plus Budi Darma Lumpo	Jl. Raya Sungai Sarik Lumpo kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	10301926		Tidak	
14	SMKS Al-Anhar Bayang	Jalan Raya Pasar Baru-Sago Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	10301944		Tidak	
15	SMKS Madrasah Arabiyah Bayang	Jl. Lubuk Pasing Talaok Bayang Talaok Kec. Bayang kab Pesisir Selatan	10310803		Tidak	
16	SMKN 1 Koto XI Tarusan	Jl. Raya Padang Painan Km.52 Batu Hampar Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	10308179	Ada		



### 5.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.50

(Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 5)  
(Menurunnya Pengangguran)

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			HAPUS BARIS INI VIA			
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	10	10
3	Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasra Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	Orang	1.250	971
4	Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hubungan industrial yang terselesaikan	perkara	5	5

Pencapaian sasaran strategis yang ke-5 dengan 1 (satu) indikator diatas didukung oleh program sebagai berikut :

Tabel 3.51  
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja  
Tingkat Pengangguran Terbuka

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Person	4,6	5,06	81,82%	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	262.499.840	258.084.010	98,32
						Penempatan Tenaga Kerja	47.000.000	46.141.960	98,17
						Hubungan Industrial	516.967.900	319.868.460	61,87
						Jumlah	<b>826.467.740</b>	<b>624.094.430</b>	<b>75,51</b>



Dilihat dari tabel diatas, total anggaran untuk mendukung sasaran dan indikator kinerja sasaran 5 sebesar Rp.826.467.740, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.624.094.430,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 202.373.310,- (24,49%).

Permasalahan rendahnya serapan anggaran pada Bidang Tenaga Kerja tahun 2024 yaitu : terlambatnya proses penandatanganan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja di Bidang Perkebunan Sawit sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pembayaran iuran jaminan social ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dibidang perkebunan sawit dari sumber Dana Dagi Hasil Sawit. Perbup tersebut ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024. Selanjutnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang penetapan peserta BPJS Ketenagakerjaan dari DBH Sawit ditetapkan tanggal 30 September 2024, sehingga yang bisa dibayarkan ke peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 3 (tiga) bulan dari Oktober – Desember 2024. Sedangkan 9 (sembilan) bulan yang belum dibayarkan di tahun 2024 menjadi silpa. Diharapkan tahun 2025 dapat diluncurkan kembali.

### 5.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.52**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60 %	5,06 %	81,82	826.467.740 ,-	627.094.430,-	75,51%	6,31

Di Bidang Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Penyetaraan, 1 orang staf serta 6 (enam) orang Instruktur yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dan beberapa orang staf baik ASN maupun Non ASN.

Pada tahun 2022, Balai Latihan Kerja (BLK) sudah berubah menjadi UPTD-BLK. dibawah Bidang Ketenagakerjaan, UPTD juga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta 1 (satu) orang Tata Usaha.



Eksistensi BLK pada saat ini cukup penting mengingat tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan lapangan kerja yang terbatas, maka dengan adanya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan ini selain itu diharapkan juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang berguna bagi pencari kerja.

Kebutuhan yang begitu besar pelatihan tenaga kerja mendorong OPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Pelatihan untuk tenaga kerja dilaksanakan guna menyiapkan tenaga kerja terlatih bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga mendukung program dengan mengalokasikan anggaran. Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh pemerintah nagari setempat, pendidikan minimal, sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah mempunyai keterampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan keterampilan supaya bisa bersaing didunia kerja.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tahun 2023, tercantum pada tabel berikut :



Tabel 3.53

Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian  
Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		<b>4.745.917.615</b>	<b>4.301.841.855</b>	<b>90,64</b>
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.433.600	30.402.000	99,90
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.985.091.039	3.557.770.196	89,28
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.849.026	228.514.603	99,85
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.820.514	105.845.000	88,34
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.639.336	203.278.267	99,33
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.084.100	176.031.789	99,41
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		<b>38.360.000</b>	<b>36.346.850</b>	<b>94,75</b>
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang wilayah Keanggotaannya	38.360.000	36.346.850	94,75
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		<b>619.615.000</b>	<b>599.079.150</b>	<b>96,69</b>
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	619.615.000	599.079.150	96,69
		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		<b>138.640.000</b>	<b>137.709.300</b>	<b>99,33</b>
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.640.000	137.709.300	99,33
4	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		<b>407.000.160</b>	<b>406.191.140</b>	<b>99,80</b>
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	407.000.160	406.191.140	99,80
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		<b>15.000.000</b>	<b>14.724.000</b>	<b>98,16</b>
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	15.000.000	14.724.000	98,16
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		<b>262.499.840</b>	<b>258.084.010</b>	<b>98,32</b>
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	227.499.840	223.821.650	98,38
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	35.000.000	34.262.360	97,89
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		<b>47.000.000</b>	<b>46.141.960</b>	<b>98,17</b>
		pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	47.000.000	46.141.960	98,17	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		<b>516.967.900</b>	<b>319.868.460</b>	<b>61,87</b>
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	516.967.900	319.868.460	61,87
	TOTAL			<b>6.791.000.515</b>	<b>6.119.986.725</b>	<b>90,12</b>



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Plafond anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis sebesar Rp. 6.791.000.515,-. Realisasi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp.6.119.986.725,- atau 90,12%.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja melebihi 100%, 2 (dua) sasaran berkisar dari 81,82% – 93,06% dan 1 (satu) sasaran belum mencapai target (43%) yaitu sasaran “Meningkatnya kualitas inovasi daerah”.

#### 2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditargetkan, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja berhasil mencapai nilai 81,82% - 106,80%.

#### 3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.6.119.986.725,- atau 90,12% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 6.791.000.515,-. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis *menurunnya pengangguran* hanya 75,51% karena SK Bupati tentang penetapan penerima BPJS Ketenagakerjaan ditandatangani tanggal 30 September 2024. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan bisa dibayarkan hanya 3 (tiga) bulan.

### 4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, makadilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Penyetaraan secara rutin dan berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.
3. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.



4. Penyempurnaan Sistem Informasi dalam pelaksanaan tugas (terintegrasinya aplikasi yang digunakan di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan).
5. Kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2024 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.



**BUPATI PESISIR SELATAN**  
**PIAGAM PENGHARGAAN**  
NOMOR: 700/1331/KPTS/BPT-PS/VI/2024

**Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN TENAGA KERJA**

Sebagai

**TERBAIK I**



Painan, 20 Juni 2024

**BUPATI PESISIR SELATAN**



*[Signature]*  
**Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.**







# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

**Refina Zulfira**

Sebagai

**JUARA III**

Pada

**KOMPETISI KETERAMPILAN INSTRUKTUR NASIONAL IX TAHUN 2024  
TINGKAT REGIONAL WILAYAH BARAT 1**

**BIDANG KOMPETISI : PENDINGIN & TATA UDARA**

yang diselenggarakan di BPVP PADANG dari tanggal 5 sampai dengan 9 Mei 2024

Jakarta, 9 Mei 2024

Direktur

Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan



**DODO SETIADI**  
NIP. 19661112 199403 1 002





# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

**Yona Wahyuni**

Sebagai

**JUARA III**

Pada

**KOMPETISI KETERAMPILAN INSTRUKTUR NASIONAL IX TAHUN 2024  
TINGKAT REGIONAL WILAYAH BARAT 1**

**BIDANG KOMPETISI : KECANTIKAN**

yang diselenggarakan di BPVP PADANG dari tanggal 5 sampai dengan 9 Mei 2024

Jakarta, 9 Mei 2024  
Direktur  
Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan



**DODO SETIADI**  
NIP . 19661112 199403 1 002

